



PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 185 TAHUN 2023
T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR
280 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI
DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Laporan Hasil
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) BSKJI TA. 2022, maka perlu
melakukan perubahan kedua atas Rencana Strategis
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun
2021-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perubahan
kedua atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri Nomor 280 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan
Jasa Industri Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
6. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 280 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI TAHUN 2021-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BSKJI 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan BSKJI untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

(1) Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi dan tujuan;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.
- f. lampiran matrik kinerja

(2) Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BSKJI ini.

Pasal 3

Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan BSKJI dalam menyusun dokumen perencanaan program, kegiatan, dan anggaran.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2024 dengan mengacu pada Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BSKJI 2021-2024.

Pasal 6

- (1) Kepala BSKJI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala BSKJI mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris BSKJI.

Pasal 7

- (1) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di lingkungan BSKJI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BSKJI melalui Sekretaris BSKJI.

Pasal 8

Peraturan Kepala BSKJI ini mulai berlaku mulai tanggal 30 Oktober 2023.

Ditetapkan di JAKARTA

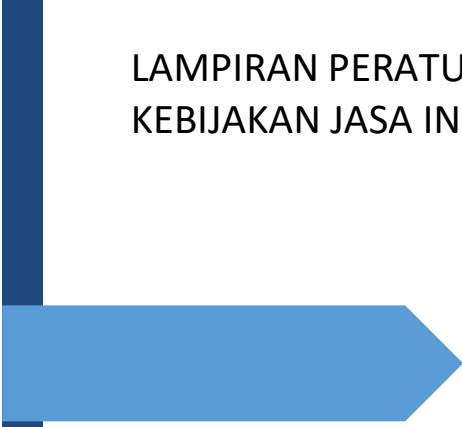
pada tanggal : 27 Oktober 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



ANDI RIZALDI

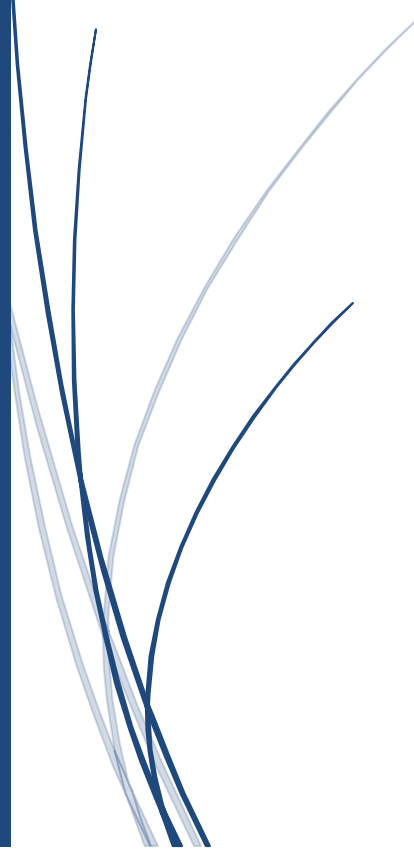
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN
KEBIJAKAN JASA INDUSTRI NOMOR 185 TAHUN 2023



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

BADAN
STANDARDISASI DAN
KEBIJAKAN JASA
INDUSTRI

2021-2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis Perubahan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) 2021-2024” dapat selesai disusun. Perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSKJI 2021-2024 dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar Unit Kerja Eselon I BSKJI mereviu kembali indikator-indikator kinerja yang masih berorientasi output dan belum memenuhi prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based* (SMART).

Dokumen Renstra BSKJI terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran akan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang ditinjau dari pengembangan perindustrian, pengembangan standardisasi industri, optimalisasi teknologi industri dan kebijakan industri, pengembangan industri hijau, pelayanan dan pengembangan industri. Pada Bab II disajikan elaborasi terhadap penurunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis bagi BSKJI. Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BSKJI. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, program dan kegiatan yang diturunkan berdasarkan sasaran strategis BSKJI. Terakhir, Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Jakarta, Oktober 2023

Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri

Andi Rizaldi

DAFTAR ISI

BAB 1	4
Pendahuluan	4
I. Kondisi Umum	4
II. Potensi dan Permasalahan	20
BAB II	27
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis	27
I. Visi	27
II. Misi	29
III. Tujuan	30
IV. Sasaran Strategis	31
BAB III	37
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	37
I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian	37
II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI	39
II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.	40
II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	42
II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	43
II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri	45
II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau	47
II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan	49
III. Kerangka Regulasi	50
IV. Kerangka Kelembagaan	51
BAB IV	54
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	54
I. Target Kinerja Utama	54
II. Target Kinerja Program	54
III. Target Kinerja Kegiatan	54
IV. Kerangka Pendanaan	55
BAB V	56
Penutup	56
Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024	58
Lampiran II Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI Tahun 2021 - 2024	59
Lampiran III Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024	220

Pedoman Kinerja Tujuan	220
Pedoman Kinerja pada P4SI	224
Pedoman Kinerja pada P2SI	228
Pedoman Kinerja pada PIH	232
Pedoman Kinerja pada POPTIKJI	238
Pedoman Kinerja pada Sekretariat BSKJI	243
Pedoman Kinerja pada BBSPJI dan BSPJI	253
Lampiran IV Matriks <i>Cascading</i>	268

BAB 1

Pendahuluan

I. Kondisi Umum

I. 1. Pengembangan Sektor Industri

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri

nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima Kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



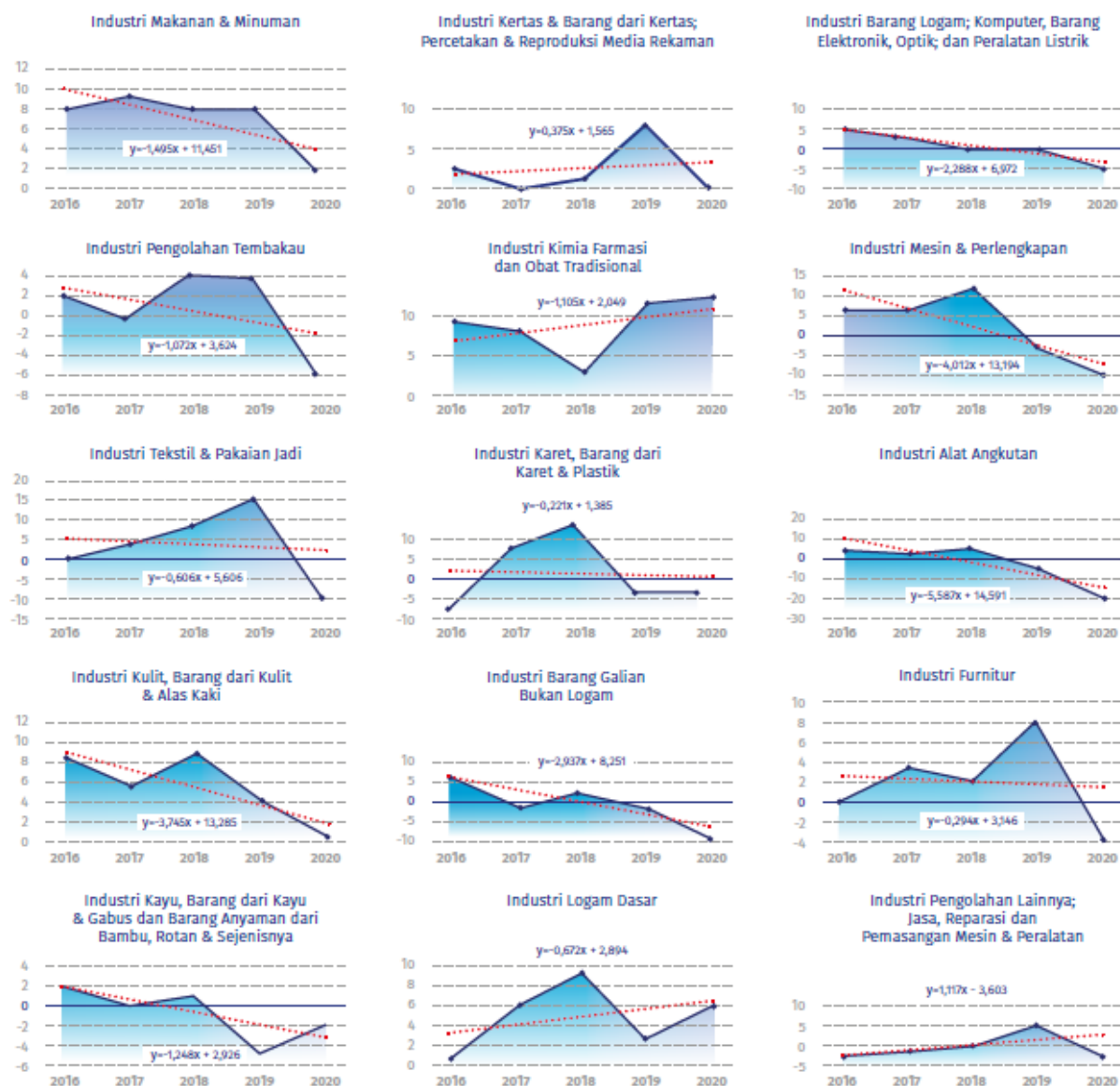
Program ketiga terkait riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah tidak lagi dimanfaatkan mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang hal yang sama, disebutkan bahwa BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:



Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).



Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang

Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas Industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5), diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar

kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%.

Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dolar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan *platform Online Single Submission* (OSS).

I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah meliputi standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 provinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium penguji sebanyak 87 laboratorium.

I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 38 provinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan kuantitasnya. Para penyidik dan pengawas yang

tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

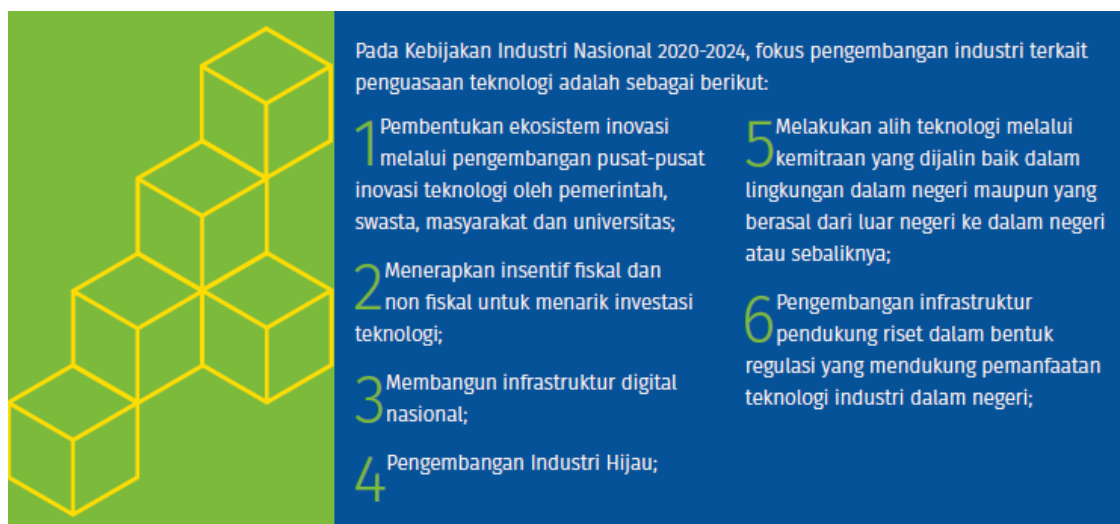
Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan.

Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN, tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.



Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor

Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasa industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BPPI terkait optimalisasi teknologi dan kebijakan industri, antara lain:

- 1) Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri sebesar 25,35%;
- 2) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 sebesar 31%;
- 3) Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan sebesar 21,43%

I. 5. Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 1), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 3 Triple Bottom Line (Anonim, 2020)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 2). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.



Gambar 4 *Sustainable Development Goals* (United Nations, 2021)

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen bersama

dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119).

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri meliputi pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri. Selama rentang waktu 2017-2019 telah tercatat sebanyak 75.135 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan. Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian relatif tinggi. Sedangkan jasa pemanfaatan dan optimalisasi teknologi harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai dengan keunggulan dan potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

Sesuai dengan arahan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024, salah satu Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau adalah mendorong peningkatan kompetensi UPT dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri. Hal ini selaras dengan RIPIN Tahap II, terkait perwujudan wawasan lingkungan. Sejauh ini, kompetensi terkait pencemaran industri baru menjadi kompetensi inti di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) di Semarang, Jawa Tengah. Perlu adanya peningkatan pelayanan terkait pengelolaan pencemaran dalam kegiatan industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI.

UPT di lingkungan BSKJI sejauh ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama terkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) balai yang telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB. Sedangkan 2 (dua) balai telah menyandang status sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Baristand Surabaya dan BBTPPI Semarang. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, beberapa UPT mendapatkan penghargaan yang baik. Baristand Industri Surabaya telah merancang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015 - 2018 sebagai bentuk inovasi di sistem pelayanannya. Pada tahun 2016, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017 juga telah merancang KIARKOD, sebuah sistem *Tracking Order* Informasi Pelayanan Jasa. Hal serupa juga dilakukan oleh Baristand Industri Ambon pada tahun 2019, melalui perancangan Sistem Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih (SI TELMI-BIAM).

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Tugas dan fungsi UPT di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

II. Potensi dan Permasalahan

II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utilitas (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan

- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asesor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;
- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.

- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/inspeksi/PPSI/PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegaskan sanksi pencabutan/ pemberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.
- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
 - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
 - b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus diubah jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang.
- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum

ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.

- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.
- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
 - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
 - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
 - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.

- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh di antara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.
- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

Potensi

- 1) Balai Besar Industri dan Baristand Industri dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru

- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan BSKJI untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.
- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

BAB II

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis

I. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”.**

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan diredefinisi menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak

hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (*global value chain*). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

VISI BSKJI
Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif
dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan
industri nasional yang mandiri dan berdaya saing.

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

II. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

MISI BSKJI

Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.

Yang bercirikan:

- 1 Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2 Pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif.
- 3 Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4 Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5 Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6 Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7 Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar, dan Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

III. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

IV. Sasaran Strategis

Penentuan sasaran strategis BSKJI perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSKJI. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSKJI sesuai dengan 13 sasaran strategis Kementerian Perindustrian (Renstra Kemenperin Revisi 2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan sasaran strategis BSKJI

Acuan SS Kemenperin	Sasaran Strategis BSKJI	Tujuan BSKJI
SS1	SP-1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SP-2: Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	T1
SS3	SP-3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS7	SP-4: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	T1
SS8	SP-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS9	SP-6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS10	SP-7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS11	SP-8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP-9: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 9 sasaran strategis BSKJI yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan kesembilan sasaran strategis BSKJI pada kerangka perspektif BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 5 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSKJI dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.



Gambar 5. Peta Strategi BSKJI (2021 – 2024)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu:

SP-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SP-1 ini akan memiliki indikator kinerja “**Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau**”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 4 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- 1) SP-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SP-2 ini akan memiliki indikator kinerja “Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5 persen dan meningkat hingga 95 persen pada tahun 2024.
- 2) SP-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SP-3 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5,5 persen dan meningkat hingga 6,5 persen pada tahun 2024.
 - b. “Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 85 persen dan meningkat hingga 95 persen pada tahun 2024.

- c. “Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 95 persen pada tahun 2024.
- d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSKJI, yaitu:

- 1) SP-4: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif. SP-4 ini akan memiliki indikator kinerja “Efektivitas regulasi standardisasi industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 74 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.
- 2) SP-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SP-5 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH).” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebanyak 43 perusahaan dan meningkat hingga 125 perusahaan pada tahun 2024.
 - b. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan meningkat hingga indeks 3,6 pada tahun 2024.
- 3) SP-6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SP-6 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI” Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 2.89 Indeks dan meningkat hingga 3 Indeks pada tahun 2024.
 - b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat hingga 92,5 persen pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu:

- 1) SP-7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional. SP-7 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 70 dan meningkat hingga 71 pada tahun 2024.
- 2) SP-8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SP-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Indeks Manfaat Kerja Sama.” Pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 4 indeks.
 - b. “Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang Terpadu dan Terintegrasi.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 20 persen dan meningkat hingga 100 persen pada tahun 2024.
 - c. “Satker yang memperoleh Indeks Layanan Publik minimal B.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat hingga 60 persen pada tahun 2024.
- 3) SP-9: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. SP-9 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI.” Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 73,8 dan meningkat hingga 74 pada tahun 2024.
 - b. “Nilai minimal laporan keuangan BSKJI.” Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan sebesar 90 dan meningkat hingga 90,5 pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BSKJI ditunjukkan pada Tabel 2. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat tujuan BSKJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 51% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 61% pada tahun 2024.
- 2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 46% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.

- 3) T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 60% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024.
- 4) T4 yaitu “Meningkatkan *Good Governance*” ini memiliki target capaian sebesar 57% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BSKJI 2021-2024.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur penunjang pertumbuhan industri	%	51	54	58	62
T1	SP2	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	%	5	10	95	95
T1	SP3	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	%	5,5	5,6	6	6,5
T1	SP3	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95
T1	SP3	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	60	65	90	95
T1	SP3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	75	80
T1	SP4	Efektivitas regulasi standarisasi industri	%	74	76	78	80
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	%	46	48	48	49
T2	SP1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7
T2	SP5	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah Perusahaan (akumulatif)	43	72	95	125

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T2	SP5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	%	60	63	67	70
T3	SP8	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	-	-	4	4
T4		Peningkatan <i>Good Governance</i>	%	57	62	68	76
T4	SP6	Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI (khusus di tingkat Eselon I)	Indeks	-	-	2.89	3
T4	SP6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92	92.5
T4	SP7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	70	70	71	71
T4	SP8	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang Terpadu dan Terintegrasi	%	20	40	62	100
T4	SP8	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60
T4	SP9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	-	-	73.8	74
T4	SP9	Nilai laporan keuangan BSKJI	Nilai	-	-	90	90.5

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1 Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;	kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
2 Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;	5 Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
3 Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;	6 Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
4 Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu	7 Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.



Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif

dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

	Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (pdb) mencapai 30% (tiga puluh persen).
	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
	Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
	Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
	Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

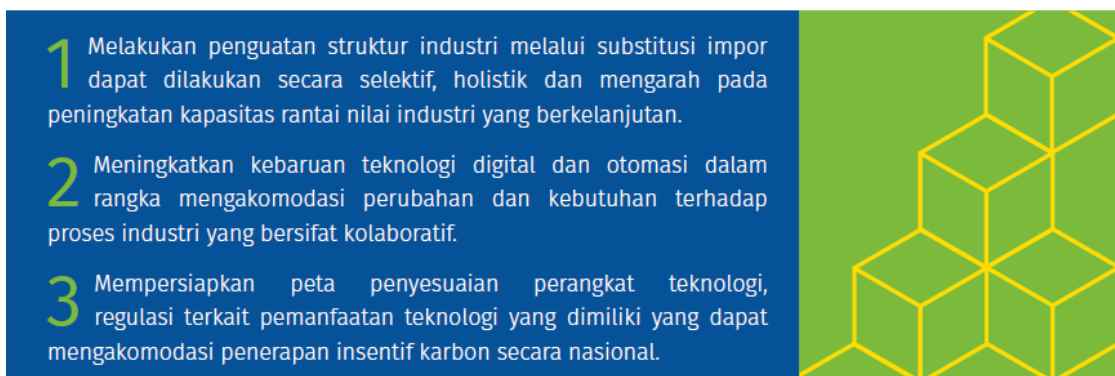
- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;

- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaikan alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:



II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan

Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (prapandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang Industri
		b)	Pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		c)	Tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib
		d)	Tersusunnya analisis dampak regulasi teknis pemberlakuan Standardisasi Industri
		e)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar
		f)	Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		g)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib
		h)	Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri
5	Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (Mutual Recognition) Terhadap Hasil Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi	a)	Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis
		b)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral.
		c)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
6	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK
7	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
8	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri

II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri
2	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		b)	Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI
		b)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNS
5	Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan standardisasi industri	a)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait
		b)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan teknologi industri. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi industri difokuskan pada tujuh sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasaan sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri dilaksanakan diantaranya dengan penguatan industri melalui optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi

produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0
		e)	Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya penguatan industri melalui optimalisasi teknologi, dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (Rintek)

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Asesmen dan pendampingan Industri 4.0
		e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
		b)	Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)

- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) *Maintenance, Repair and Overhaul*
- 6) Konsultasi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi
- 8) Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri

Tabel 6. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	a)	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri	a)	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan, termasuk jasa verifikasi TKDN, jasa pemeriksaan halal dan jasa pendukung industri 4.0

II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Standar Industri Hijau		Tersedianya Standar Industri Hijau
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
5	Kebijakan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau		Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
8	Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri		Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri.
9	Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri		Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10	Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru Terbarukan di Sektor Industri		Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor industri
11	Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri		Tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi UPT dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
14	Penghargaan Industri Hijau		Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri (informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

Ke depan, UPT di lingkungan BSKJI diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan menjadi bentuk BLU pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang

lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

III. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi Kebutuhan Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	PIC UKE 2	Institusi Terkait/	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2020
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2024
3	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2021-2024
4	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
5	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI & P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
6	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	PIC UKE 2	Institusi Terkait/	Target
7	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2024
8	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	PIH	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2024

IV. Kerangka Kelembagaan

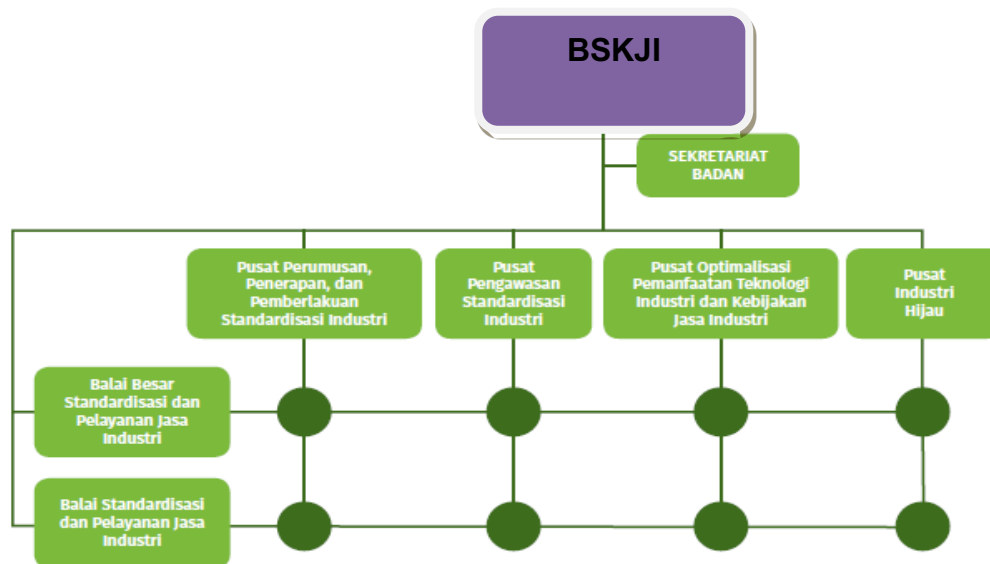
Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 8. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2021 - 2024

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur hubungan fungsi antar unit di lingkungan BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024.

Hal lain yang perlu segera ditindaklanjuti adalah perlunya penetapan unit khusus yang menangani kebijakan jasa industri, terlebih di era teknologi industri 4.0 sektor jasa industri menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi Di Kementerian Perindustrian, diidentifikasi bahwa dari total 882 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masuk dalam binaan Kementerian Perindustrian, 123 KBLI diantaranya masuk ke dalam jenis jasa industri. Dengan demikian, pembinaan terhadap pelaku usaha, pertumbuhan bisnis dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha jasa industri dapat lebih optimal. Selain itu, dengan adanya pengkhususan akan pengawasan standardisasi maka juga akan memerlukan unit khusus yang menangani spesifik tugas dan fungsi pengawasan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

I. Target Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSKJI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dan *consumer* Rencana Strategis BSKJI tahun 2021-2024. BSKJI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BSKJI. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

II. Target Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 dengan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

III. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian

penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis BSKJI 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II maupun Unit Pelaksana Teknis. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks cascading tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

IV. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSKJI tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSKJI. Kebutuhan anggaran BSKJI tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kebutuhan Pendanaan BSKJI Tahun 2021 – 2024

(Dalam Rp Juta)

No	Unit Kerja	2021	2022	2023	2024
1	Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	12.705,51	18.393,8	14.477,15	11.000
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	5.297,03	9.791,54	8.535,83	7.500
3	Pusat Industri Hijau	5.524,22	13.333,62	10.535,84	37.300
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	8.482,52	22.806,73	13.752,19	25.500
5	Sekretariat BSKJI	68.083,41	59.578,55	48.963,33	56.891
6	Unit Pelaksana Teknis	560.216,22	544.831,31	597.925,36	607.139
TOTAL		660.308,91	668.735,55	694.189,70	745.330

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra ini.

BAB V

Penutup

Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005- 2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020- 2024, Making Indonesia 4.0 dan Renstra Kementerian Perindustrian. Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing” dan misi BSKJI yaitu untuk dan misi BSKJI yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau.” Misi BSKJI juga telah mencerminkan misi yang dapat menjadi misi keempat pusat BSKJI yaitu Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; Pusat Pengawasan Standardisasi Industri; Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri, dan; Pusat Industri Hijau. Dalam melakukan tugasnya keempat pusat tersebut akan berkolaborasi dengan UPT setingkat Eselon II dan III yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

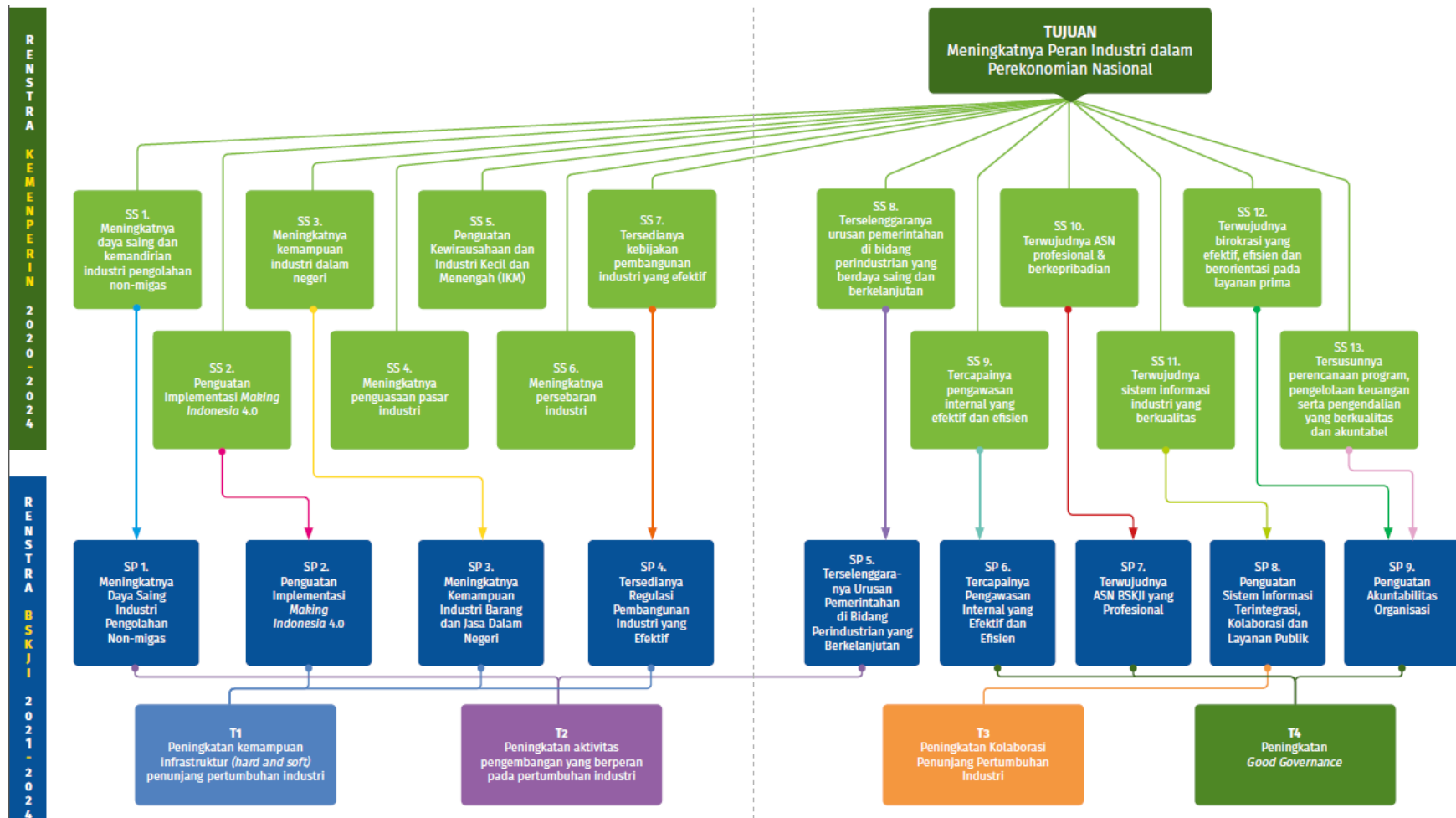
Dalam melaksanakan misi BSKJI telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang jelas. BSKJI memiliki 9 sasaran strategis yang telah dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BSKJI telah menetapkan indikator untuk setiap sasaran strategis tersebut yang selanjutnya akan dijadikan acuan mendasar bagi strategi dan sasaran eselon I, II dan UPT. BSKJI telah menjabarkan arah kebijakan dan sasaran yang terbagi ke dalam enam bagian, yaitu:

- 1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri;
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;

- 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri;
- 5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan;
- 6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BSKJI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan; (5) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas.

Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024



Lampiran II Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI Tahun 2021 - 2024

Sasaran Program	Ko de	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI								660,3	668,7	694,2	745,3	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri												
SP1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7					PIH
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	a	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	%	5	10	95	95					POPTIKJI
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	5,5	5,6	6	6,5					P4SI
	b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95					P2SI
	c	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	60	65	90	95					POPTIKJI, BBSPJI, BSPJI
	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	75	80					Seluruh Unit Kerja
SP4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif											

Sasaran Program	Ko de	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	a	Efektifitas regulasi standardisasi industri	%	74	76	78	80					P4SI
SP5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	a	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	43	72	95	125					PIH
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,6					Set, BBSPJI, BSPJI
Program Dukungan Manajemen												
SP6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	a	Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI	Indeks	-	-	2.89	3					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92	92.5					Set, BBSPJI, BSPJI
SP7	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	70	70	71	71					Set, BBSPJI, BSPJI
SP8	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik											
	a	Indeks manfaat kerja sama	Indeks	-	-	4	4					Set
	b	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	%	20	40	62	100					Set
	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60					Set, BBSPJI, BSPJI
SP9	Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
	a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	-	-	73.8	74					Set, BBSPJI, BSPJI

Sasaran Program	Ko de	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	b	Nilai laporan keuangan BSKJI	Nilai	-	-	90	90.5					Set, BBSPJI, BSPJI

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI				660,308.91		668,735.55		694,189.70		745,330
Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri				12,705.51		18,393.80		14,477.15		11,000.00
SK.1	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.1.1	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	Persen	5,5		5,6		6		6,5	
A	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC			1,851.36		5,458.06		5,357.12		3,500.00
B	Regulasi Teknis Pemberlakuan Standardisasi Industri			732.33		1,051.56		2,000.00		3,500.00
C	Forum standardisasi industri			299.58		291.00		318.50		90.00
D	Diseminasi tentang Regulasi Teknis									88.14
SK.1.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P4SI	Persen	40		42		44		45	
A	Penguatan Kemampuan LPK			7,737.69		10,000.00		4,212.78		
B	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran P4SI			109.17		242.25		381.50		221.86

*Anggaran kegiatan/aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi P4SI			717.74		546.14		800.00		400.00
SK.1.3	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di Dalam Negeri (satker)	Ruang Lingkup	20		25		30		35	
A	Penguatan Kemampuan LPK*									
B	Kerja Sama Global Project Quality Infrastructure									1,000.00
SK.3	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif									
SK.3.1	Efektivitas regulasi standardisasi industri	Persen	74		76		78		80	
A	Peninjauan/Kaji Ulang SNI			214.99						
B	Kajian Efektifitas Penerapan SNI			486.60						
C	Pemeliharaan Sni Sektor Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka					127.01		189.35		
D	Pemeliharaan Sni Sektor Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil					179.30		217.90		
E	Regulasi Teknis Penunjukan LPK Dalam Rangka Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri			556.05		498.48		1,000.00		2,200.00
Pusat Pengawasan Standardisasi Industri				5,297.03		9,791.54		8,535.83		7,500.00
SK.1	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.1.1	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	Persen	85		87		90		95	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian LSPro			865.92		1,221.49		482.68		1,028.28
B	Forum Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian LSPro			317.57		538.43		261.23		233.48
C	Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian Lab Uji					681.61		1,202.02		999.17
D	Forum Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian Lab Uji					258.47		254.07		239.07
SK.1.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P2SI	Persen	72		75		78		80	
A	Sistem Informasi Pengawasan Standardisasi					301.43				
B	Penyusunan Rencana Program Anggaran dan Monev			950.50		919.04		1,000.00		800.00
SK.1.3	Peningkatan cakupan jenis pengawasan SNI wajib	Persen	5		20		30		50	
A	Regulasi/kebijakan Pengawasan Standardisasi Industri			285.87		371.06		535.85		400.00
B	Pelatihan Petugas Pengawas Standardisasi Industri			1,000.00		1,500.01		160.15		346.52
C	Pelatihan Petugas Penyidik PNS					320.21		1,054.52		653.48
D	Pengawasan Produk SNI*									
E	Forum Pengawasan Produk Standard Nasional Indonesia/Forum koordinasi PPNS*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.1.4	Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI wajib	Persen	30		50		75		95	
A	Pengawasan Produk SNI			1,283.50		2,300.00		2,265.12		2,000.00
B	Forum Pengawasan Produk Standard Nasional Indonesia/Forum koordinasi PPNS					700.00		734.87		234.10
C	Penindakan Penerapan SNI/penegakan hukum			593.67		679.79		585.32		565.90
Pusat Industri Hijau				5,524.22		13,333.62		10,535.84		37,300.00
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	Persen	4		5		6		7	
A	Peningkatan Manajemen Energi & Air serta Pemanfaatan EBT (Renewable Energy) Dalam Rangka Efisiensi Sumberdaya Industri			555.32		1,000.00				1,250.00
B	Penghargaan Industri Hijau			1,000.00		1,000.00		550.00		
C	Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Industri Hijau									3,500.00
D	Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau*									
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Persentase jumlah perusahaan yang mengelola limbah industri	Persen	N/A		N/A		0.8		1	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri			238.66		1,000.00		450.00		450.00
B	Kajian & Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri			338.66		1,000.00		450.00		500.00
C	Penyusunan Percepatan Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri									3,500.00
D	Pilot Project Implementasi Perdagangan Karbon di Industri									1,800.00
E	Pengembangan National Lighthouse Ekonomi Sirkular Sektor Industri dan Penguatan Ekosistem Industri Daur Ulang									3,000.00
F	Penyusunan Upaya Peningkatan Mitigasi dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri dalam Pencapaian NDC			420.47						
G	Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Industri					700.00				3,000.00
H	Transisi Energi, Mitigasi GRK dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Industri							700.00		
SK.3	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.1	Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus	Persen	100		100		100		100	
A	Perumusan dan pemeliharaan Standar Industri Hijau			600.00		1,100.00		1,000.00		3,500.00
B	Penyusunan kajian kebutuhan standar industri hijau					400.00				
C	Kajian Pemberlakuan Wajib Standar Industri Hijau			224.60		500.00				
SK.4	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.4.1	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan	43		72		95		131	
A	Fasilitasi Sertifikasi Industri Hijau			502.59		2,000.00		5,000.00		2,500.00
B	Campaign penerapan SIH			212.62		500.00				
C	Forum Koordinasi Pembangunan Industri Berkelanjutan			122.23						
D	Pendampingan Teknis Implementasi Pemenuhan Persyaratan Standar Industri Hijau Sektor Industri					2,000.00		2,000.00		3,500.00
E	Penyusunan Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau			339.35		660.00				
SK.4.2	Tingkat kepatuhan LSIH	Persen	N/A		N/A		N/A		100	
A	Penguatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau			152.65		650.00				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Penilaian dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau			225.21		350.00				412.10
C	Pengendalian dan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Industri Hijau			264.19						
D	Pengembangan Jasa Industri Hijau dan IKM Hijau									2,500.00
E	Bimbingan Teknis Auditor Industri Hijau									587.90
SK.4.3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PIH	Persen	68		70		80		85	
A	Penyusunan Program dan Rencana Kerja			327.67		473.62		385.84		800.00
B	Pengadaan alat uji									6,500.00
Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri				8,482.52		22,806.73		13,752.19		25,500.00
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Persentase jumlah perusahaan peserta rintisan teknologi yang produktivitas/ efisiensinya meningkat	Persen	N/A		65		95		95	
A	Rintisan Teknologi Industri			698.69		859.05		500.00		1,000.00
B	Strategi komersialisasi KI					400.00				
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2.1	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	Persen	5		10		95		95	
A	Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 dalam rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0			1,350.00		3,466.35		2,000.00		5,000.00
B	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Learning Factory					470.08				
C	Pengembangan SDM Asesor Indi 4.0					481.02				
D	Pengembangan Learning Factory 4.0 Balai			28.83		82.56				
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	60		65		90		95	
A	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi (Dapati)			4,300.00		9,540.95		6,599.99		6,500.00
B	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi (Pinoti)			350.00		4,548.00		2,652.20		5,500.00
C	Perumusan Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri					452.00				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.2	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di POPTIKJI	Persen	72		75		88		90	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran POPTIKJI			1,055.98		1,059.87		1,000.00		1,000.00
SK.4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif									
SK.4.1	Persentase rekomendasi di bidang jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	Persen	N/A		70		75		80	
A	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Jasa Industri					347.27		367.17		102.18
B	Penyusunan Aturan Perundangan/Kebijakan Teknis Jasa Industri			699.02		86.47		182.83		105.27
C	Isu Aktual Jasa Industri					579.27				
D	Penyusunan Norma, Standard, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Aktivitas Jasa Industri					250.00		250.00		171.15
E	Verifikasi Teknis dan Pengawasan Jasa Industri					183.86		200.00		121.40
F	Pengembangan Ekosistem Jasa Industri EPC Nasional									6,000.00
SEKRETARIAT BSKJI				68,083.41		59,578.55		48,963.33		56,891.58
SK.1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.1.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI (Khusus di tingkat Eselon I)	Indeks	N/A		N/A		2.89		3	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP			69.48		307.11		168.02		150.00
SK.1.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92		92.5	
A	Pengelolaan Perbendaharaan/Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Internal dan Eksternal Serta Penguatan Pengawasan			342.94		480.37		362.32		110.00
SK.2	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri									
SK.2.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	Persen	72		75		75		80	
A	Penyusunan kajian ekosistem penguatan standardisasi dalam pengendalian produk impor dan peningkatan industri dalam negeri									2,200.00
B	Layanan Sarana Internal			1,813.78		2,951.32		1,000.00		1,364.11
C	Bantuan Masker dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PPKM Mikro			5,400.00						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Peralatan laboratorium pendukung kesehatan (PEN)			14,853.50						
E	Bantuan fasilitas kesehatan dalam rangka dukungan kesehatan (PEN)			2,282.08						
F	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan UPT			3,021.37		10,000.00				
G	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga					184.26		200.00		705.00
SK.3	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK.3.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70		70		71		71	
A	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal			208.18		312.27		250.00		252.55
B	Layanan manajemen SDM			1,335.43		1,819.60		3,375.00		1,692.45
C	Gaji dan Tunjangan			21,818.17		25,864.82		26,500.00		27,270.25
D	Operasional Perkantoran			11,091.42		10,825.00		10,500.00		13,043.92
SK.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik									
SK.4.1	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang Terpadu dan Terintegrasi	Persen	20		40		62		100	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			1,608.16		1,005.32		1,192.90		1,248.85
SK.4.2	Indeks Manfaat Kerja Sama (Skala 1 - 5)	Indeks	N/A		N/A		4		4	
A	Pelayanan hukum dan kerjasama			509.56		741.38		575.00		579.30

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.4.3	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	Persen	25		35		45		60	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas			586.39		251.02		250.00		270.00
SK.5	Penguatan akuntabilitas organisasi									
SK.5.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI (Khusus di tingkat Eselon I)	Nilai	N/A		N/A		73,8		74.0	
A	Monitoring & Evaluasi Program dan Anggaran *									
B	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran *									
SK.5.2	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	Persen	N/A		N/A		89	-	93	
A	Monitoring & Evaluasi Program dan Anggaran			385.87		1,230.33		1,539.32		2,071.84
B	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			1,686.50		1,891.45		1,753.09		4,118.31
SK.5.3	Nilai laporan keuangan BSKJI	Nilai	N/A		N/A		90		90.5	
A	Layanan manajemen keuangan			1,070.58		1,714.30		1,297.68		1,815.00
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan				29,572.31		68,034.75		94,215.17		28,615.16
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		5		6	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Layanan Kerja sama Litbang			75.64						
B	Kekayaan Intelektual Hasil Litbangyasa yang Diusulkan untuk Dipatenkan			13.50						
C	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Industri Kimia dan Farmasi					11.28				
D	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Industri Kemasan					11.28				
E	Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi							8.07		21.53
F	Layanan Konsultansi			40.72						
G	Layanan Pendampingan dan Konsultansi Pemanfaatan Teknologi Industri					19.10				
H	Layanan Pendampingan dan Konsultansi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Jasa Industri Lainnya*									
I	Jasa Konsultansi Peningkatan Teknologi IKM (DAPATI)*									
J	Layanan Pengujian*									
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	1		1		1		1	
A	Perencanaan Sarana, Prasarana dan Gedung Fasilitas Produksi Fitofarmaka			2,005.85						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pembangunan Gedung Fasilitas Produksi Fitofarmaka					43,219.25				
C	Pengadaan Fasilitas Produksi Fitofarmaka			182.58				68,762.92		
D	Layanan Kerja sama Litbang*									
E	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Industri Kimia dan Farmasi*									
F	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Industri Kemasan*									
G	Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi*									
H	Layanan Konsultasi*									
I	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Teknologi dan Jasa Industri Lainnya*									
J	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Penerapan Standar					13.80				
K	Layanan Pengujian*									
L	Analisis (Penyusunan) dan Penerapan Standar					15.35				
M	Pengawasan Standardisasi					27.63				
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Penerapan Standar							13.98		22.30

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Analisis (Penyusunan) dan Penerapan Standar							16.69		27.61
C	Pengawasan Standardisasi							22.14		55.46
D	Layanan Sertifikasi*									
E	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Teknologi dan Jasa Industri Lainnya*									
F	Layanan Pengujian*									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5		5		6		7	
A	Jasa Konsultasi Peningkatan Teknologi IKM (DAPATI)*									
B	Layanan Konsultasi*									
C	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Jasa Industri Lainnya					30.62				
D	Layanan Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Teknologi dan Jasa Industri Lainnya							37.64		65.32
E	Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*									
F	Layanan Pengujian*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1		3		3.1		5	
A	Layanan Pengujian			1,171.44		945.90		925.49		1,144.27
B	Layanan Kalibrasi			116.06		108.91		119.90		159.88
C	Layanan Sertifikasi			434.79						
D	Layanan Sertifikasi Produk					415.15		543.95		578.40
E	Layanan Sertifikasi Industri Hijau					8.98		11.12		19.10
F	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis			115.93						
G	Layanan Pendampingan dan Konsultansi Jasa Industri Lainnya*									
H	Layanan Pendampingan dan Konsultansi Penerapan Standar*									
I	Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*									
J	Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan					11.36		21.97		21.09
K	Layanan Verifikasi TKDN dan Inspeksi Teknis					9.09		21.34		45.38
L	Layanan Pemeriksa Halal					6.57		28.34		31.92
M	Layanan Sertifikasi Manajemen Mutu					6.86		6.87		29.50
N	Layanan Sertifikasi dan Verifikasi Ekolabel							7.11		19.36

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		3		3,5	
A	Layanan Pengujian*									
B	Layanan Kalibrasi*									
C	Layanan Sertifikasi*									
D	Layanan Sertifikasi Produk*									
E	Layanan Sertifikasi Industri Hijau*									
F	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis*									
G	Layanan Pendampingan dan Konsultansi Jasa Industri Lainnya*									
H	Layanan Pendampingan dan Konsultansi Penerapan Standar*									
I	Layanan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*									
J	Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan*									
K	Layanan Verifikasi TKDN dan Inspeksi Teknis*									
L	Layanan Pemeriksa Halal*									
M	Layanan Sertifikasi Manajemen Mutu*									
N	Layanan Sertifikasi dan Verifikasi Ekolabel*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
O	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan					141.15		171.81		372.51
P	Penyusunan Roadmap Rencana Pengembangan LPK							2.25		2.25
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75		50		80	
A	Pengadaan Peralatan Layanan			1,029.66		310.16		393.14		801.75
B	Pengadaan Peralatan Laboratorium			2,250.00						
C	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			251.19		86.74		207.00		232.00
D	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			508.75		387.42		242.40		171.49
E	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional					605.00		302.50		
F	Pengadaan Fasilitas Produksi Fitofarmaka*									
G	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan*									
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		100		100	
A	Penerapan Zona Integritas			78.97		20.68		42.31		39.54
B	Penerapan SPIP dan PIPK			63.98		18.29				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Penerapan SPIP							33.32		32.82
D	Penerapan PIPK							15.14		17.58
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.50		3.50		3.60		3.63	
A	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis			117.43		38.75				
B	Kerja sama Litbangyasa dan Layanan Teknis			45.26						
C	Penerbitan Jurnal Kimia Kemasan dan Majalah Portal			59.87						
D	Penyelenggaraan Seminar/Workshop/ Temu Pelanggan atau Pertemuan sejenis					5.75		33.65		42.07
E	Fasilitasi Kemitraan Layanan Jasa					18.63				
F	Fasilitasi Kemitraan Layanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan							36.21		24.56
G	Pengelolaan Media Informasi Publik (Website dan Medsos)							19.48		13.43
H	Pelaksanaan Publikasi Layanan Teknis Penyelenggaraan							12.30		15.25
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		72		73		74	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi / Pelatihan			117.38						
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM					112.35		154.39		538.10
C	Pengelolaan/ Manajemen SDM			85.28		46.38		48.00		49.76
D	Gaji dan Tunjangan			13,307.39		14,556.00		14,537.24		15,839.51
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.90		3.95		4.03		4.05	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			6,120.92		6,659.50		7,092.48		7,212.31
B	Pengembangan Teknologi Informasi dan Website			65.67		29.79		45.87		47.50
C	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan			1,168.24						665.41
D	Pemantauan dan Pengelolaan Limbah Laboratorium							121.20		90.33
E	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*									
F	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran*									
G	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional*									
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.10		80.30		80.50		80.70	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran			40.20		46.47		42.10		47.59
B	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Laporan Monev			26.09		21.92		32.06		36.13
C	Penyelenggaraan Kearsipan, dan Persuratan			24.54		25.57		23.53		23.36
D	Penyelenggaraan Perpustakaan							4.51		
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	88		88		90		91	
A	Layanan Kegiatan Sistem Akutansi Instansi dan Inventaris Kekayaan Negara			55.00						
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					43.06		54.76		58.82
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro				44,039.58		49,629.55		42,801.21		42,820.88
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		5		7	
A	Kerja sama optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro			3,885.65		2,716.57		58.35		50.83
B	Layanan RBPI			100.00		100.00		50.00		25.00
C	Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri agro							69.96		22.28
D	Kegiatan DAPATI									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		1		2	
A	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Agro			1,565.47		1,045.59		602.50		
B	Layanan RBPI*									
C	Kerja sama optimalisasi pemanfaatan teknologi industri agro*									50.00
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	5		6		7		8	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi teknis/manajemen industri agro							50.00		25.00
B	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Agro							100.00		100.00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Agro*							150.00		150.00
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	10		11		12		13	
A	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi			132.90		61.90		202.92		150.00
B	Kegiatan DAPATI*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1		2		2		3	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Agro			4,622.79		5,918.67		4,975.50		5,734.01
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Agro			1,243.05		780.37		1,547.63		1,294.42
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Agro*							1,578.36		1,866.61
D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Agro			212.86		282.47		719.78		622.50
E	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik Industri Agro			199.22		100.25		152.02		153.90
F	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Agro			501.51		370.51		500.10		600.10
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	5		5		5		5	
A	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan					500.00		1,050.00		1,350.00
B	Surveilen ABICAL-Pengujian					69.92		76.42		63.42
C	Surveilen ABICAL-Kalibrasi			43.50		52.56		52.56		52.56
D	Pemeliharaan Lembaga Sertifikasi Sistem BBIA			54.30		107.30		114.32		84.32
E	Pemeliharaan Lembaga Sertifikasi Produk BBIA			70.22		44.30		54.32		54.32
F	Surveilen ABITIS			41.21		32.80		48.16		48.16

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
G	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK									
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75		78		80	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			131.60		50.00		119.90		100.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92		92		95		100	
A	Operasional Perkantoran			3,178.77		3,908.40		4,844.80		4,705.80
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.60		3.60		3.65		3.70	
A	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik			50.00		50.00		50.00		150.00
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		75		78	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			80.00		92.84		150.00		200.00
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			10,801.80		11,136.51		9,251.22		9,392.88
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.51		3.55		3.80		4.10	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis			46.26		40.00		50.00		100.00
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	82.2		83.3		85		86	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			17,078.47		22,168.59		16,132.39		15,574.77
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		92		94	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor*							50.00		100.00
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam				29,432.04		21,466.70		22,171.35		25,780.43
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		20		20	
A	Pengembangan Kerja Sama Litbang			50.28						
B	Jasa Penelitian Dan Pengembangan			247.30		77.55				
C	Pengembangan Hasil Litbang Untuk Kesiapterapan Alih Teknologi Dan Inkubasi			44.12						
D	Inkubasi Teknologi pada Industri					170.41				
E	Kerja sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis					72,54		52.54		52.92

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri*									
G	Jasa Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri							100.00		
H	Peningkatan Teknologi dan penguatan Industri							225.08		225.08
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Konsultansi Pendampingan Industri 4.0			32.25		32.18		87.92		69.49
B	Jasa Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri			134.22		90.22				
C	Jasa Optimaslisasi Pemanfaatan Teknologi Industri 4.0									90.92
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	5		5		5		5	
A	Kajian Standar Sni Wajib Dan Usulan Sni			23.18		43.46				
B	Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri							154.56		171.33
C	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi			32.25		32.18		87.92		48.40
D	Konsultansi Standar Sni Wajib Dan Usulan Sni							49.13		53.65
E	Analisis, Pengawasan dan Penerapan Standardisasi Industri							30.00		
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	10		10		13		15	
A	Kegiatan DAPATI									
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1		3		3		5	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			297.69		243.30		364.62		436.62
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			21.78		21.78		30.08		30.08
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			1,277.49		665.10				
D	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			192.37		246.22				
E	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri*									
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		5		5	
A	Jasa pelayanan teknis sertifikasi							899.64		1,330.19
B	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri							221.43		187.01
C	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji			82.14						
D	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi			55.69		105.62		85.44		90.44

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi Laboratorium							191.14		199.64
F	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi			214.02		272.54		207.00		228.46
G	Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Balai Besar Keramik (LSP-P1 BBK)			35.88		36.05		93.65		96.64
H	Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu KNAPPP			25.58						
I	Pengembangan Lembaga Sertifikasi Indi 4.0 & Sindi 4.0							60.90		
J	Pemeliharaan dan Pengembangan Akreditasi Laboratorium Pengujian					124.18				
K	Peninjauan dan Penyusunan Skema Sertifikasi					32.48				
L	Penyelenggaraan Uji Profisiensi					86.14				
M	Pengembangan Skema Kompetensi					73.23				
N	Penyusunan Roadmap Pengembangan LPK							30.00		
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	20		65		70		75	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Renovasi/pembangunan Gedung Laboratorium/workshop/layanan			2,624.00						
B	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan			7,064.86		1,571.50		1,095.27		981.00
C	Layanan Sarana Internal BPPI BBK			662.74						
D	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi					187.00		302.70		364.40
E	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran					54.50		72.50		259.95
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92		92		100		100	
A	Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001			48.62		50.48		66.10		55.64
B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP			58,32		71,29		53,37		54.58
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.60		3.60		3.61		3.62	
A	Diseminasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan			238.67						
B	Pameran Dan Promosi Layanan Jasa Teknis			272.77						
C	Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti			66.12		63.92		63.92		63.92
D	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi					253.24		282.68		339.22

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis BBK									
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		76		76		77	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			155.41		456.88		384.82		928.48
B	Gaji Dan Tunjangan			10,515.76		10,956.98		11,081.26		12,255.62
C	Pengelolaan/Manajemen SDM			39.81		39.81		39.81		37.44
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.10		3.40		3.60		3.90	
A	Pengelolaan Data Dan Informasi			117.90		191.10		274.61		185.62
B	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor			4,747.53		5,060.00		5,313.00		6,631.78
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.5		82		77		77.5	
A	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran			28.78		34.06		38.38		37.40
B	Penyelenggaraan Kearsipan					55.18		57.90		73.53
C	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi			39.92		50.10		51.62		118.64
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90.5		90.5		91		92	
A	Implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi			42.90						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	Barang Milik Negara (simak-bmn) Dan Sistim Akuntansi Instansi (sai)									
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					89.31		75.74		82.34
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil				22,949.87		21,503.37		22,331.63		23,904.68
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		20		20	
A	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil									
B	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI									
C	Jasa pelayanan teknis konsultansi*									
D	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Tekstil							50.00		46.35
E	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI*									
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		1		2	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Jasa pelayanan teknis konsultansi/Manajemen Industri Tekstil			150.84		78.87		92.64		111.44
B	Layanan Audit Internal: Akreditasi/Surveillance/Re-akreditasi: Pelaksanaan Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri Tekstil							50.00		
C	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI*									
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		4		4	
A	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri tekstil									370.80
B	Pelaksanaan sistem manajemen lembaga sertifikasi									35.96
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	60		65		20		20	
A	Kegiatan DAPATI							79.22		
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5.0		5.0		5.1		5.2	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Jasa pelayanan teknis pengujian industri tekstil			876.13		604.93		931.48		1,257.60
B	Jasa pelayanan teknis pengujian			224.38		263.54				
C	Jasa pelayanan teknis kalibrasi			190.36		246.44		285.21		233.00
D	Jasa pelayanan teknis sertifikasi sistem mutu			20.89		19.20				
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk			102.99		128.42				
F	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri tekstil*							321.14		
G	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis industri tekstil			47.02		62.50		57.55		79.12
H	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI			38.80		48.65		27.78		68.89
I	Jasa pelayanan teknis konsultasi/Manajemen Industri Tekstil*									
J	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknik									75.39
K	Jasa Pelayanan Pendampingan dan Verifikasi TKDN									39.42
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		3		3.1	
A	Jasa pelayanan teknis pengujian industri tekstil*									
B	Jasa pelayanan teknis pengujian*									
C	Jasa pelayanan teknis kalibrasi*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Jasa pelayanan teknis sertifikasi sistem mutu*									
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk*									
F	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri tekstil*									
G	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis industri tekstil*									
H	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil/ RBPI*									
I	Jasa pelayanan teknis konsultasi/Manajemen Industri Tekstil*									
J	Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015			32.35		38.28		38.13		32.17
K	Pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian			33.01		68.08		111.81		141.74
L	Pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium kalibrasi			23.34		30.33		31.63		54.13
M	Pelaksanaan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 17021:2015			22.62		25.18				
N	Pelaksanaan lembaga sertifikasi produk (LsPro Texpa) sesuai SNI ISO 17065:2015			34.62		28.08				
O	Pelaksanaan sistem manajemen lembaga sertifikasi*							40.89		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
P	Penyusunan dokumen rencana pengembangan LPK							50.00		
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	60		60		75		75	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			97.10		122.87		142.00		
B	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran			131.54		207.30		153.75		249.61
C	Pengadaan peralatan laboratorium dalam rangka dukungan kesehatan			2,543.48						
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/ workshop/ layanan			130.50						
E	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan			1,214.46		632.26		230.00		688.80
F	Gedung laboratorium/layanan jasa teknis yang dibangun/direnovasi							450.70		
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		100		100		100	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP			16.78		5.81		8.80		8.80

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran			54.20		7.39		40.61		43.24
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.60		3.60		3.61		3.62	
A	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi			347.06		538.08				241.08
B	Sosialisasi dan Diseminasi							153.17		
C	Layanan Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			45.18		78.14		34.94		35.78
D	Pengelolaan Data dan Informasi					78.96		76.16		
E	Pengelolaan Kehumasan dan Pelayanan Informasi Publik									84.97
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		74	
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga:			213.67						
B	Pengelolaan/Manajemen SDM			236.93		8.52		8.42		7.92
C	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM					313.87		394.77		879.63
D	Gaji dan Tunjangan			10,933.84		12,408.00		12,786.48		13,183.60
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.70		3.80		4.01		4.20	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,856.18		5,241.20		5,398.26		5,722.16

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pengelolaan Data dan Informasi			198.65		86.26		113.90		
C	Pengembangan Sistem Informasi Layanan dan e-Office BBT									38.03
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.15		80.20		76.05		77.00	
A	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran			35.28		32.10		41.20		44.00
B	Monitoring dan Evaluasi Program dan Anggaran*									
C	Penataan Kearsipan			30.25		20.21		26.40		26.24
D	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP			49.02		22.15		29.97		30.90
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	91		91		92		92	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			18.42		57.75		74.63		73.91
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik				58,324.89		43,604.89		55,806.11		61,140.78
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		4		5	
A	Hilirisasi hasil litbang			50.00						
B	Jasa pelayanan inspeksi teknik					1,400.00				
C	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi/RBPI dan Layanan Teknis							50.00		100.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	4		6		8		2	
A	Jasa pelayanan pelatihan teknis			2,500.00						
B	Jasa pelayanan pelatihan teknis konsultasi B4T					600.00				
C	Jasa pelayanan konsultasi teknis/ manajemen							1,000.00		400.00
D	Analisis, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri									0.00
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi									3,000.00
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A		10		10		12	
A	Penerbitan jurnal teknologi bahan dan barang teknik					50.00				
B	Pemanfaatan Teknologi Industri Bahan dan Barang Teknik/RBPI							200.00		200.00
SK.3.2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	3		3		3		3	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Jasa pelayanan teknis pengujian			2,673.26		2,200.00				
B	Jasa pelayanan inspeksi teknik			1,355.00				2,000.00		2,100.00
C	Jasa pelayanan teknis kalibrasi			970.00		900.00				
D	Jasa pelayanan teknis Sertifikasi			1,475.00		2,000.00		2,700.00		3,500.00
E	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis					1,900.00		2,750.00		3,000.00
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		5		5	
A	Jasa pelayanan teknis pengujian Industri Bahan dan Barang Teknik							3,000.00		3,000.00
B	Jasa pelayanan teknis kalibrasi dan standardisasi							2,500.00		
C	Pemeliharaan dan pengembangan akreditasi/lembaga/ laboratorium/LPK			250.00		250.00		950.00		
D	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK							50.00		
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75		78		80	
A	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran			13,613.12		665.12		3,500.00		4,527.00
B	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi			634.72		200.00		500.00		750.00
C	Renovasi gedung dan bangunan			500.00		300.00		500.00		2,284.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Pengadaan sarana dan prasarana underwater welding			1,490.34						
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91		92		98		100	
A	Monitoring dan evaluasi program dan anggaran			117.50		50.00		200.00		400.00
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.50		3.60		3.62		3.63	
A	Pameran dan promosi layanan jasa teknik			100.00		109.78		539.98		500.00
B	Seminar Teknologi Bahan dan Barang Teknik			65.00		90.22		210.02		225.00
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		73		74	
A	Pendidikan dan pelatihan pegawai			200.00		150.00		200.00		300.00
B	Gaji dan tunjangan			7,894.22		7,642.77		8,520.33		9,074.78
C	Operasional dan pemeliharaan kantor			23,892.43		24,579.00		25,000.00		26,000.00
D	Pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian			192.80		175.00		660.78		600.00
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.80		3.85		3.87		3.90	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Survey kepuasan masyarakat			25.00		25.00		25.00		25.00
B	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis IoT			100.00		150.00		250.00		450.00
C	Peningkatan pelayanan informasi publik			28.00		28.00		30.00		30.00
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.1		80.1		77.0		77.5	
A	Penyusunan rencana kerja dan anggaran			40.00		40.00		200.00		400.00
B	Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi			108.50		50.00		95.00		100.00
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		92	
A	Pengelolaan SAI dan BMN			50.00		50.00		175.00		175.00
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa				19,898.52		21,484.00		24,125.00		23,091.48
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		4.5		4.5	
A	Layanan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan			198.11						
B	Konsultansi pengembangan dan pemanfaatan teknologi					250.00		355.40		
C	Alih Teknologi dan Inkubasi			25.20						
D	Kolaborasi kegiatan DAPATI									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri									319.40
F	Pemanfaatan Teknologi Industri Selulosa									50.00
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Optimalisasi Teknologi Industri RBPI									
B	Layanan Konsultasi Teknis							178.00		178.00
C	Konsultasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									
D	Layanan Standardisasi									
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Layanan Konsultasi Standard*									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A		5		5		5	
A	Layanan konsultasi teknis					204.00				
B	Layanan Konsultasi Standard					51.60		94.40		54.40
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	N/A		N/A		3		3	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			445.30						
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			66.50						
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			315.51		245.06		305.00		332.60
D	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis			23.80		110.00		85.80		85.80
E	Layanan Konsultansi Standard			59.40						
F	Layanan konsultansi teknis			98.10						
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	2		2		3		3	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian					316.40		354.40		721.90
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi					67.00		67.00		95.70
C	Perluasan Ruang Lingkup Layanan Pengujian							50.00		
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	48		60		65		70	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			407.18		102.00		102.00		
B	Pengadaan Alat Laboratorium			131.00		117.48		501.00		550.80
C	Pengadaan Inventaris Perkantoran			909.56		54.50		290.00		
D	Buku / Referensi / Standard			10.79		10.00		30.00		
E	Pengadaan Peralatan/Inventaris Kantor									213.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		100		100	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			100.10						
B	Monitoring dan Evaluasi					46.00				
C	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi							46.00		36.00
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.60		3.60		3.64		3.64	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			30.80						
B	Renovasi Ruang Rapat Tamu			199.74						
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,979.96						
D	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis					203.60		203.30		250.00
E	Renovasi/Pembangunan Gedung Laboratorium									237.70
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		73	
A	Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan			91.70						
B	Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			51.70						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pengelolaan Kepegawaian					38.90		37.50		
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM					75.40		75.40		
E	Gaji dan Tunjangan			11,531.77		13,244.00		14,983.00		13,815.18
F	Layanan Manajemen SDM									37.50
G	Layanan Pendidikan dan Pelatihan									77.00
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.51		3.52		3.53		4.01	
A	Promosi Layanan Jasa			24.40						
B	Pengelolaan Kerjasama			105.90						
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					6,200.00		6,200.00		5,900.00
D	Pengelolaan Data dan Informasi					32.64		35.00		45.00
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.2		80.3		78.5		79	
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			30.20						
B	Evaluasi Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi			39.10						
C	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran					42.80		42.80		37.50
D	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP					34.60		35.00		
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		91	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			11.70		22.24		29.00		29.00
B	Pengelolaan Barang Milik Negara			11.00		15.78		25.00		25.00
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin				23,907.45		25,682.00		27,693.64		28,446.72
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		2		3	
A	Kerjasama dengan Industri/Instansi/Lembaga Terkait									
B	Penelitian Dan Pengembangan Purwarupa			150.00						
C	Majalah Jurnal Litbang Logam dan Mesin			47.90						
D	Kerjasama			13.87		44.41		45.00		82.71
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	4		5		1		2	
A	Layanan RBPI Dan HKI			174.50		161.36				
B	Jasa Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin							264.91		612.39
C	Pendampingan dan Supervisi untuk optimalisasi implementasi 4.0 pada Industri Logam dan Mesin							150.00		116.89

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		2	
A	Jasa Pelayanan teknis Sertifikasi					230.44		465.53		476.06
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A		10		11		12	
A	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Logam dan Mesin									
B	Optimalisasi teknologi industri							126.00		94.23
C	Kegiatan DAPATI							114.29		
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	3		3		3		5	
A	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi			268.80		361.91		361.56		395.91
B	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Logam dan Mesin			149.84		152.25		134.10		225.00
C	Jasa pelayanan teknis Pengujian			290		289		306		340
D	Jasa Pelayanan teknis Sertifikasi			221.14						
E	Layanan Uji Kompetensi			60.32						
F	Jasa pelayanan teknis Inspeksi									
G	Jasa penyelenggaraan uji profisiensi untuk industri									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		2		3	
A	Jasa pelayanan teknis Kalibrasi									
B	Jasa pelayanan teknis Pengujian									
C	Jasa Pelayanan teknis Sertifikasi									
D	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Logam dan Mesin*									
E	Jasa pelayanan teknis Inspeksi			47.40		37.80		40.95		52.80
F	Jasa Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Logam dan Mesin*									
G	Jasa penyelenggaraan uji profisiensi untuk industri							64.70		76.71
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	60		60		60.5		61	
A	Perbaikan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana Perkantoran			1,925.82						
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			325.18		148.12		202.70		446.34
C	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran			280.68		108.74		210.85		293.98
D	Perlengkapan Kantor			656.71						
E	Langganan Daya dan Jasa			2,355.07						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional					150.00				
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		93	
A	Layanan Reformasi Birokrasi			54.47		38.81		42.04		42.05
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.6		3.6		3.65	
A	Pelaksanaan pemasaran/promosi/pameran/publikasi layanan teknis			109.06		100.61		128.74		166.04
B	Pengelolaan Data dan Informasi			10.40		10.46				
C	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI					57.33		57.75		
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		71		71.5	
A	Pengembangan SDM			142.40		179.64		332.19		323.53
B	Gaji dan tunjangan					17,835.98		18,456.86		18,652.05
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.01		3.1		3.2		3.3	
A	Penyelenggaraan, Promosi dan Komersialisasi Layanan Jasa Teknis*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					5,662.03		6,001.80		5,861.91
C	Pengelolaan Data dan Informasi							19.58		19.57
D	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*									
E	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran*									
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78		78		75		76	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			25		31		41.2		41.2
B	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			34.79		54.42		69.55		69.55
C	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan							19.58		19.57
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		91		92		93	
A	Pengelolaan SAI dan BMN			16564.52		27.9		37.8		37.83
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik				22,675.61		23,081.42		23,628.75		25,385.90
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		6		7	
A	Diseminasi							48.84		53.18
B	Partisipasi dalam Pameran/Promosi			75.53		58.09		56.49		116.94

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi			73.61		90.00		33.15		67.39
D	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis			29.90		29.90		20.00		25.43
E	Jasa pelayanan konsultansi teknis/ manajemen/ RBPI*									
F	Kajian Awal Kelayakan Teknologi Pengembangan Produk Kulit, Karet, dan Plastik*			76.33						
G	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI*			95.27						
H	Pengusulan hasil litbangyasa untuk dipatenkan			40.02						
I	Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang			13.32						
J	Penerapan hasil litbangyasa			92.58						
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		2		2	
A	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			121.19		110.00				
B	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri							80.00		118.04
C	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri							10.00		
D	Jasa pelayanan audit teknologi									34.60

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	2		3		2		3	
A	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen							60.00		85.86
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5		5		6		7	
A	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi			50.30		50.30				
B	Kegiatan DAPATI							75.96		
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5		5		20		23	
A	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			198.11		723.12		588.34		1,060.27
B	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			516.74		400.00		344.96		567.22
C	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			216.34		183.54		82.17		183.16
D	Kaji ulang dokumen SNI			73.39		12.34				
E	Jasa pelayanan sertifikasi profesi							31.50		43.74
F	Jasa pelayanan inspeksi teknis							70.00		30.88
G	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca							52.58		40.90
H	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi							32.40		49.92
I	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal							28.50		244.75
J	Miniplant karet							67.32		22.91
K	Miniplant kulit									28.75

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
L	Jasa pelayanan audit teknologi									
M	Jasa pelayanan pendampingan dan assemen INDI 4.0									
N	Jasa pelayanan Verifikasi TKDN									
O	Pengembangan bahan acuan standar (standar reference material) berbasis karet dan Lembaga Produsen Bahan Acuan (PBA)									306.21
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		5		7	
A	Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji			84.58		80.40		55.64		55.64
B	Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi			23.65		91.33		48.68		77.30
C	Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi			205.71		197.76		181.71		156.50
D	Akreditasi/pemeliharaan lembaga inspeksi					49.40		46.40		52.38
E	Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca							29.84		71.82
F	Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profesiensi							30.57		30.57
G	Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal							39.10		39.10

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
H	Penyusunan roadmap pengembangan LPK									
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75		78		80	
A	Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi			104.93		200.64		146.70		
B	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			130.05		40.00		76.45		564.85
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,351.41		4,721.59		4,957.67		5,255.13
D	Pengadaan kendaraan bermotor operasional							388.00		
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	100		100		100		100	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			21.98		15.00		15.00		13.42
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.70		3.75		3.80		3.85	
A	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan			548.47		365.00				
B	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan			60.66		60.66		41.84		111.82
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		76		78		81	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			358.80		283.77		320.00		500.00
B	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan			14,326.41		14,880.70		14,747.30		14,666.37
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.01		3.51		3.60		3.70	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			109.29		10.00				
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			440.27		235.50		635.63		503.50
C	Pengelolaan data dan informasi			141.76		120.69		121.00		143.23
D	Pengelolaan Kearsipan			13.34		13.34		15.00		10.51
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	82.0		82.3		77.0		80.1	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			37.38		20.00		15.00		17.16
B	Penerapan SPIP			18.60		12.65		15.00		11.46
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		92	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			25.70		25.70		20.00		25.00
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik				22,410.15		22,979.75		23,482.20		24,866.50
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		5		10	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi Teknis/Manajemen Industri*									25.00
B	Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik									
C	Konsultansi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									
D	Peningkatan Kerjasama Teknologi			4.15				25.00		40.00
E	Temu Pelanggan Dan Peningkatan Kerjasama					108.00		75.00		
F	Peningkatan kerjasama Kolaborasi RBPI									
G	Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian			28.10						
H	Fasilitasi dan Pemeliharaan Inkubasi Industri Kerajinan dan Batik			171.48		45.08				
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		1		2		2	
A	Fasilitasi dan Pemeliharaan Inkubasi Industri Kerajinan dan Batik*									
B	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/Manajemen Industri			5.43		23.39				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Konsultansi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									
D	Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik									44.64
E	Analisis, penerapan, dan pengawasan standarisasi industri									
F	Penerapan Hasil Litbangyasa			36.38						
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		2		4	
A	Analisis, penerapan, dan pengawasan standarisasi industri									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	5		5		6		10	
A	Penerapan Hasil Litbangyasa			36.38						
B	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Untuk Penguatan Industri							65.00		
C	Fasilitasi dan Pemeliharaan Inkubasi Industri Kerajinan dan Batik*									25.00
D	Konsultansi pengembangan dan pemanfaatan teknologi									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2		3		4		10	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			269.70		291.70		217.00		354.06
B	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			69.49		105.84		25.95		67.00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			98.81		142.33		20.00		202.26
D	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri			568.76		531.46		360.00		630.00
E	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/Manajemen Industri/RBPI			5.43		23.39		10.00		
F	Jasa Pemanfaatan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik			9.84				25.00		80.00
G	Analisis, penerapan dan pengawasan, standardisasi industri									
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		20		20	
A	Jasa pelayanan teknis konsultasi Teknis/Manajemen Industri									
B	Jasa pemanfaatan teknologi industri Kerajinan dan Batik									
C	Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga (laboratorium Uji)			50.52		107.50		50.00		95.94
D	Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Laboratorium Kalibrasi			15.18		55.60		35.05		40.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi			86.37		53.27		55.00		115.99
F	Pengelolaan Dan Pengembangan Lsp P-1			15.49						
G	Penyusunan Road Map Pengembangan LPK									
H	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu-iso 9001:2015					33.80		50.00		30.00
I	Akreditasi/Surveillance/Reakredit asi dan Pengembangan Kelembagaan									
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75		78		80	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			174.51		33.05		158.01		100.00
B	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			560.10		30.70		480.00		100.00
C	Pembangunan / Renovasi Gedung Dan Bangunan*									
D	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional					372.50				
E	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan									82.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan							365.39		558.45
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	100		100		100		100	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi							15.00		15.00
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.55		3.57		3.60		3.65	
A	Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/Pameran/Publikasi/Layanan Teknis Industri Kerajinan dan Batik			102.77		40.50		40.00		130.00
B	Penyelenggaraan Temu Pelanggan dan Pen ingkatan Kerjasama			28.77		108.00				
C	Penyelenggaraan Seminar dan Workshop Industri Kerajinan dan Batik			66.12		24.47		80.00		100.00
D	Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil Litbangyasa Balai Besar Kerajinan Dan Batik			27.08						
E	Jasa pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri			182.68		531.46				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah			16.89		10.60		11.00		11.00
G	Penerbitan Majalah			22.78		10.99		10.00		9.00
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		76		78		77	
A	Peningkatan Kompetensi Sdm			110.97		99.13		160.00		330.00
B	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan			14,455.15		14,294.35		15,249.96		15,951.62
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.90		3.95		4		4.0	
A	Layanan Publik			19.00						
B	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor			4,827.36		5,632.20		5,505.38		5,452
C	Optimalisasi Pelayanan Informasi			55.90		26.27		100.00		80.00
D	Pengembangan Perpustakaan			23.52		10.50		15.00		
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.1		80.5		79.0		80.9	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			16.25		0.75		15.00		15.00
B	Program Pengelolaan 5 K Dan Pengarsipan			16.14		0.75		15.00		15.00
C	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi*									15.00
D	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/spip			3.72		8.70		10.00		15.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		91.5	
A	Administrasi Pengguna Anggaran			228.94		223.47		239.46		137
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim				27,448.46		27,605.55		29,713.44		32,493.43
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		6		7	
A	Pendampingan Peningkatan Teknologi*									
B	Otomatisasi Alat Pasteurisasi Dan Optimalisasi Teknologi Peningkatan Umur Simpan Produk Di Ikm Hinutz							48.00		
C	Optimalisasi Dan Otomatisasi Alat Kristalisasi Gula Semut Di Ikm Edd Palm Sugar							98.84		
D	Optimalisasi Sistem Pengarangan Tempurung Kelapa Pada Pt Nusantara Agro Organik							74.69		
E	Optimalisasi Teknologi Pengolahan Kopi Di Ikm Sentra Kopi Pinogu							128.25		
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	2		2		3		3	
A	Pendampingan Peningkatan Teknologi									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Inkubator Teknologi			238.44		183.57				
C	Konsultansi industri							225.00		
D	Pendampingan Transformasi Industri 4.0									61.50
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Konsultansi industri									92.81
B	Pendampingan Penerapan SNI pada Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim									71.35
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	5		5		5.3		5.5	
A	Pendampingan Peningkatan Teknologi			209.78						
B	Pendampingan Teknologi					183.58		250.00		
C	Pendampingan Teknologi dan Pengoperasian Workshop									144.50
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5		5		5		5	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			1,182.70		1,576.74		2,768.22		3,590.49
B	jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			61.96		60.99		85.00		120.78
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			314.33		609.69		755.00		1,000.00
D	Layanan Pelatihan			1.49		15.00				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Layanan Pelatihan Industri/siswa/mahasiswa							102.50		70.00
F	Jasa Pelayanan Sertifikasi Industri Hijau			87.19		19.79		75.00		111.00
G	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal			130.77		142.73		487.48		297.00
H	Jasa Pelayanan Teknis Inspeksi Lembaga			97.38		82.24		145.00		110.43
I	Jasa Pelayanan Verifikasi Teknis							250.00		
J	Jasa Pelayanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu									108.27
K	Layanan Jasa Sertifikasi Profesi									110.52
L	Jasa Pelayanan Verifikasi TKDN									250.00
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		2		2.5	
A	Reakreditasi/Surveillance Lab Uji			40.09		95.59		71.61		79.56
B	Reakreditasi/Surveillance Lab Kalibrasi			31.85		45.85		60.69		66.50
C	Reakreditasi/Surveillance LSPro			49.03		59.03		60.06		79.91
D	Surveilen, Witness, PRL Lembaga Inspeksi							61.96		65.92
E	Surveilen, Witness, PRL LPH							61.96		
F	Surveillance dan PRL LSIH									43.40
G	Surveillance dan PRL LSSM									76.15
H	Surveillance dan Pengajuan Peningkatan Status LPH Utama									75.87

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
I	Pengembangan Layanan Sertifikasi HACCP									130.00
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		40		70		73	
A	Peralatan Fasilitas Laboratorium/ Workshop /Layanan UPT			234.00		1,420.15				
B	Peralatan Pendukung Pada Gedung Layanan Dan Perkantoran			450.00						
C	Renovasi Gedung Layanan Dan Perkantoran			2,218.82						
D	Renovasi Gedung Laboratorium Dan Pelayanan Publik			3,166.08						
E	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor			495.15						
F	Peralatan Laboratorium BBIHP			180.30						
G	Peralatan Lab Uji Dan Halal			1,497.85		2,522.00				
H	Renovasi Gedung Laboratorium Terintegrasi					2,303.00				
I	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					156.39				
K	Peralatan Laboratorium Pengujian							1089.00		2000.00
L	Renovasi Gedung Unit Pelayanan Publik							1506.00		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
M	Renovasi Gedung Laboratorium Terintegrasi									2700.00
N	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran							565.00		309.00
O	Pengadaan Alat Pengolah Data							150.00		281.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		93	
A	Reakreditasi ISO 9001:2015 dan Penerapan Zona Integritas			123.48						
B	Pemeliharaan ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, SOP-AP, dan SPIP					23.92		83.81		103.33
C	Pembangunan Zona Integritas					78.89				
D	Penerapan Zona Integritas, Pemeliharaan SOP-AP dan SPIP							140.69		107.18
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.5		3.6		3.6	
A	Penerbitan Jurnal Bbihp Dan Kajian Standar			116.54		77.43				
B	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI							56.43		57.79
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi dan Layanan Teknis IHPMM			196.04		194.47				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Promosi dan Kerjasama Kemitraan Layanan Teknis IHPMM							172.64		350.00
E	Pengelolaan Indeks Kepuasan Pelanggan					43.46				
F	Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Layanan Publik							85.13		46.59
G	Temu Pelanggan					66.80		158.00		170.00
H	Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID)							28.36		
I	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi							139.87		
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		72		75		80	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			489.65		535.71		754.85		500.00
B	Webinar/sosialisasi/bimbingan Teknis			21.07						
C	Pelayanan Administrasi Kepegawaian					38.43		130.40		120.00
D	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			9,831.04		10,535.44		11,466.54		11,226.94
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.50		3.75		4.01		4.15	
A	Kesehatan Pegawai			333.96		318.26		216.28		174.48

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Keperluan Perkantoran			2,201.98		2,636.29		2,777.29		3,074.86
C	Belanja Langganan			669.12		1,025.82		943.63		1,074.60
D	Pemeliharaan Bangunan, Sarana Dan Prasarana			1,395.54		1,331.48		1,574.87		1,363.03
E	Operasional Perkantoran Lainnya			1,024.40		813.28		952.05		1,136.23
F	Pengelolaan Website Bbihp Dan Pengembangan Sil			132.35		114.74		158.29		
G	Pengembangan Website									136.00
H	Peningkatan Sistem Informasi Layanan (SIL)									257.00
I	Pendampingan dan Penerapan Standar SNI							87.00		
J	Pendirian lembaga sertifikasi SMM ISO 9001:2015							140.25		
K	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran									
L	Pengelolaan Data dan Informasi									
M	Pengadaan Kendaraan Bermotor roda 2 Operasional									34.44
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.5		80.7		77.0		78.0	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			48.05		96.61		148.58		125.00
B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			92.95		105.83		146.31		130.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga							86.14		135.00
D	Pemeliharaan ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, SOP-AP, dan SPIP*									
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	80		80		80		82	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			85.11		92.34		146.77		125.00
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri				29,686.79		31,990.50		32,177.57		34,565.62
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		2		3	
A	Implementasi Hasil Litbangyasa			299.67						
B	Pengelolaan HKI Hasil Litbangyasa			35.33						
C	Optimasi Pemanfaatan Teknologi Industri/ Rancang bangun perekayasaan industri					100.00		471.00		500.00
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Jasa Pelayanan Litbangyasa			210.91						
B	Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri					135.87		146.55		250.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri							100.00		100.00
D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri									225.00
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	3		4		5		5	
A	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri*									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A		10		10		11	
A	Jasa Konsultasi (DAPATI)					477.57		478.26		500.00
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2		2		3		4	
A	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran			5,572.94		3,158.95		3,279.28		4,231.28
B	Layanan Pengujian Aneka Komoditi			625.00		1,066.00		825.00		1,175.00
C	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			11.36		11.92		45.39		51.35
D	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu			34.16		13.60		37.60		47.16
E	Layanan Sertifikasi Produk			421.44		389.76		434.76		480.96

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Layanan Sertifikasi Industri Hijau			19.18		11.00		37.00		51.22
G	Layanan Sertifikasi Iso 14001 Untuk Industri/ Manajemen Lingkungan			23.72		13.40		28.40		33.42
H	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			113.60		192.53				
I	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri							192.53		
J	Layanan Audit Energi			34.44		21.90				
K	Layanan Audit Air Dan Lingkungan			43.88						
L	Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*									
M	Layanan Audit Energi/Audit Air/Audit Lingkungan							193.35		
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		2		3	
A	Layanan Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca							26.20		125.00
B	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi									125.00
C	Layanan Sertifikasi Profesi									100.00
D	Layanan Sertifikasi Halal									100.00
E	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian			338.81		1,684.09		1,310.51		953.95

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Pengembangan Ruang Lingkup Dan Metode Uji			84.42						
G	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Lembaga Sertifikasi			238.74		153.73		206.33		259.95
H	Pengembangan infrastruktur LPK							100.00		100.00
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	55		58		62		65	
A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/ workshop/layanan			1,546.98		1,500.00		3,354.00		5,000.00
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			206.00		123.25		38.60		200.00
C	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran			150.00		420.00		131.57		1,600.00
D	Pembangunan/renovasi Gedung Dan Bangunan			195.00		1,845.00				
E	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga			315.75		78.28		65.16		80.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		93	
A	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi			16.04		16.84		8.42		8.42
B	Layanan Pengawasan Internal			24.06						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP					8.22				
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.60		3.62		3.63		3.65	
A	Desiminasi Hasil Litbang			40.85						
B	Partisipasi Dalam Pameran Teknologi			18.38						
C	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelayanan Pelanggan			337.49						
D	Pengelolaan Majalah/jurnal Ilmiah Dan Publikasi Kti			158.79		43.06		50.64		50.64
E	Pelaksanaan Pemasaran/promosi/ Pameran/publikasi Layanan Teknis					257.60		255.07		302.71
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		76		78		80	
A	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional			7.82		34.96		55.82		60.80
B	Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Teknis			124.47		239.97		287.78		357.12
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN					57.80		112.93		120.00
D	Pengelolaan/Manajemen SDM			268.30		342.18		126.98		165.68
E	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan			12,035.26		13,809.00		13,329.91		10,326.99

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	4.2		4.3		4.35		4.4	
A	Pengelolaan Data Dan Informasi			527.34		403.92		401.88		680.62
B	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor			5,439.58		5,201.50		5,870.50		6,000.00
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.5		81		77.0		80.0	
A	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran			41.57		33.90		36.90		36.90
B	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi			23.82		11.70		27.23		27.23
C	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP					18.22		8.22		24.44
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		91		92		93	
A	Layanan Pelaksanaan Audit Oleh Kantor Akuntan Publik			55.00						
B	Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan			46.69		114.78		103.80		114.78
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh				13,184.83		12,846.68		13,910.19		15,593.10
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		10		15	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan RBPI*									
B	Pemanfaatan Peralatan Pengolahan Getah Jernang*									
C	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan RBPI							17.95		
D	Hasil Litbangyasa PRN Baristand Industri*			216.43						
E	Kolaborasi dan Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Industri									22.63
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		3	
A	Monitoring dan evaluasi penerapan dan pengawasan standardisasi							75.00		97.63
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	60		65		25		30	
A	Program DAPATI*									
SK3.2	Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri	Persen	5		5		3		3	
A	Pengujian bahan baku			641.68		58.63		642.00		660.01
B	Pengujian limbah cair, udara, dan emisi			696.38		782.24		769.00		1,020.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Operasional dan penyelenggaraan lab			333.85		225.00		225.00		240.00
D	Operasional dan pemeliharaan instansi pengelolaan limbah			29.95		30.76		30.00		30.00
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi			189.10		180.51		189.32		230.00
F	Layanan pelatihan			30.98		45.32		107.19		56.64
G	Pelaksanaan DPLH			28.30				34.16		
H	Pelaksanaan kegiatan laboratorium kalibrasi									
I	Pelaksanaan kegiatan laboratorium pemeriksa halal									50.00
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		3.5		5	
A	Operasional dan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah lab BSPJI Banda Aceh*									
B	Jasa pelayanan teknis sertifikasi*									
C	Layanan pelatihan*									
D	Pengujian Bahan baku*									
E	Pengujian limbah cair, udara, dan emisi*									
F	Operasional dan penyelenggaraan lab*									
G	Pelaksanaan DPLH*									
H	Pelaksanaan kegiatan laboratorium kalibrasi*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
I	Pelaksanaan kegiatan laboratorium pemeriksa halal*									
J	Pelaksanaan kegiatan surveillance penguji			76.68		49.35		57.30		50.00
K	Pelaksanaan kegiatan surveillance LS-PRO			59.00		58.70		63.35		50.00
L	Pelaksanaan kegiatan surveillance 9001 : 2015			47.25		53.30		54.60		50.00
M	Pelaksanaan kegiatan persiapan pembuatan dokumen laboratorium kalibrasi			20.72		21.98		32.78		
N	Pelaksanaan kegiatan persiapan akreditasi sertifikasi halal							32.78		30.00
O	Pelaksanaan kegiatan surveillance laboratorium kalibrasi									50.00
P	Pelaksanaan kegiatan persiapan akreditasi lembaga verifikasi dan validasi									
Q	Pelaksanaan kegiatan Lembaga manajemen mutu									
R	Pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga manajemen lingkungan									
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72		75		65		67	
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			1,180.94				137.76		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran					180.00				84.00
C	Pengadaan Laboratorium/Workshop/Layanan									1267.66
SK.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		100		100	
A	Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kerja dan kegiatan			62.58		76.06		87.71		38.87
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.6		3.6		3.65	
A	Temu teknis dan sosialisasi kompetensi Balai			39.59		66.80		79.87		100.00
B	Seminar nasional/ internasional/ diseminasi/ promosi/ BSPJI			59.54						
C	Kegiatan Promosi BSPJI Banda Aceh									70.00
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	72		75		72		75	
A	Peningkatan kompetensi aparatur teknis BSPJI Banda Aceh			32.42		43.99		40.99		288.00
B	Pelaksanaan pelayanan kepegawaian dan rumah tangga perkantoran			4.25						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Gaji dan Tunjangan			5,903.23		7,218.51		7,256.90		7,007.85
D	Pengelolaan SDM									20.00
SK7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.30		3.37		3.30		3.50	
A	Pelayanan Sistem Informasi Publik			14.45						
B	Pengembangan Website SIL					33.13		31.93		
C	Pembenahan jaringan			76.61						
D	Operasional dan pemeliharaan kantor			3,269.02		3,469.10		3,642.56		3,938.68
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.2		80.4		75		77	
A	Perencanaan, penyusunan program kerja dan anggaran			96.42		119.51		116.25		45.00
B	Zona Integritas menuju WBK dan WBBM/SPIP			61.17		66.84		118.84		25.00
C	Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan									15.00
SK8.2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	91		92		93		94	
A	Pengelolaan laporan keuangan dan e-monitoring			14.30		66.95		66.95		56.13
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan				17,078.12		16,643.30		17,158.76		18,148.44
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		10		12	
A	Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan*			120.00						
B	Pelaksanaan Konsultasi Kepada Pelaku Industri terkait Pemanfaatan Teknologi					50.00				
C	Pelaksanaan Kolaborasi Kepada Dunia Industri dan Akademisi Terkait Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis							32.13		39.48
D	Kerja sama dan pengembangan Industri/Rancang Bangun dan Perekayasaan									
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	2		3		4		5	
A	Hasil Litbangyasa yang Diterapkan di Industri			47.46						
B	Paket Teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh Industri			49.05						200.93
C	Pelaksanaan Konsultasi/ Problem Solving Industri (Pengembangan Unit Produksi Iron Casting PT. Jaya Baru)					86.16				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Penerapan Pemanfaatan Teknologi oleh Baristand Industri					93.84				
E	Pelaksanaan Konsultasi Kepada Pelaku Industri Terkait Pemanfaatan Teknologi							120.61		
F	Pelaksanaan Konsultasi/ Problem Solving Industri (Pengembangan Unit Produksi RM)							43.64		
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5		10		10		12	
A	Program DAPATI/PINOTI									
SK3.2	Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri	Persen	2		2		5		10	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			765.82		695.00		738.96		643.50
B	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			23.24		24.00		52.00		117.14
C	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi			51.84		60.00		90.37		190.15
D	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			553.81		437.58		461.37		581.00
E	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal									39.31
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		5		6	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001			190.46		230.00		193.57		365.15
B	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi			60.00		60.00		23.70		99.98
C	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi			131.08		111.42		167.79		140.20
D	Peningkatan Layanan/ Penyusunan Roadmap Pengembangan LPK/LPH/SIH/LSSM									129.42
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	56		60		61		62	
A	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			459.44		590.26		1,054.92		860.55
B	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran			198.00		158.00		126.95		71.45
C	Pengadaan peralatan laboratorium dalam rangka dukungan kesehatan			138.60						
D	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					178.00		60.00		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		92		100		100	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP					78.21		78.40		25.20
B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi							56.41		51.66
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,6		3.60		3,73		3,74	
A	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis			321.44		295.00		270.19		351.46
B	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi			1072.63						
C	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan			60.00						
D	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi			138.00						
E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3531.85						
F	Pengelolaan majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI					45.00				
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		72		72,1		72,2	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			311.61		314.25		216.59		543.38
B	Pengelolaan/Manajemen SDM					45.75		46.04		34.51
C	Gaji dan Tunjangan			8,468.54		8,429.32		9,043.00		9,631.20
SK7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.52		3.6		3.95		4.05	
A	Pengelolaan data dan Informasi			35.42		65.00		65.00		34.69
B	Operasional dan Pemeliharaan kantor					4,046.00		3,884.91		3,806.36
C	Gedung laboratorium/workshop/layanan yang dibangun/direnovasi					198.72				
D	Pengelolaan majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			33.32				20.00		
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.6		81		75.0		77.25	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			92.00		191.26		214.31		121.65
B	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah tangga			137.12						
C	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			40.42		54.84				
D	Penyelenggaraan Kearsipan					44.30		34.84		14.51
SK8.2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80		80		81		82	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			46.97		61.39		63.06		55.56
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang				15,588.51		15,124.90		15,653.94		15,458.84
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		2		4	
A	Inventarisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi industri			6.47						
B	Layanan konsultasi, Optimalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Industri BSPJI Padang							27.82		47.24
C	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis			36.16						
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	1		2		2		3	
A	Perlindungan HKI untuk IKM			33.50				11.75		
B	Pengembangan Optimalisasi Pembinaan Industri (OPPI) BSPJI Padang					19.65		24.97		46.18
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	6		8		10		12	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi (Kegiatan Dapati)							141.73		
B	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			161.22		90.27				
SK.3.2	Meningkatnya PNP layanan Jasa Industri	Persen	N/A		0.5		0.5		0.5	
A	Pemasaran kompetensi Jasa Layanan teknis pengujian dan sertifikasi BSPJI Padang			89.56		63.57		43.65		
B	Pameran hasil kompetensi jasa layanan teknis BSPJI Padang			38.00		73.36				
C	Sosialisasi Kompetensi Jasa Layanan Teknis BSPJI Padang							35.45		
D	Temu Bisnis Stakeholder dan Public Hearing			165.91		51.40		84.95		
E	Pendampingan Penerapan Standar untuk Industri									199.20
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		0.04		0.1	
A	Jasa Layanan Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi			387.00		643.54		1,404.29		1,381.95
B	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK									
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	60		65		65.1		65.12	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Teknis			1,194.88		660.43		745.61		367.42
B	Pengolahan perangkat data dan komunikasi					290.70		134.05		76.76
C	Sarana dan Prasarana perkantoran			89.87		158.42		58.53		98.65
D	Pengadaan kendaraan bermotor									401.04
SK.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		95		95.1	
A	Kegiatan Zona Integritas			53.31		26.13		33.51		
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			13.59		12.83				
C	Monitoring, Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan			27.97		31.53		32.13		50.13
D	Manajemen Anti Penyuapan Sesuai SNI 37001					66.93		62.67		32.53
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.5		3.52		3.53	
A	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			34.06		19.94		10.09		
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74		74		74.5		75	
A	Peningkatan dan pengembangan Kompetensi SDM			200.17		145.54		152.79		595.78

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			8,019.53		8,313.03		8,735.79		8,465.86
C	Operasional Perkantoran dan Pimpinan			2,038.90		2,254.30		1,574.06		1,560.25
D	Pelayanan Kepegawaian			11.64		24.26		13.78		27.31
E	Poloklinik dan Obat-obatan			102.99		43.35		12.17		12.50
SK7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.51		3.55		3.56		3.57	
A	Renovasi Ruangank Perkantoran BSPJI Padang							247.50		192.00
B	Perawatan Gedung Kantor			371.22		337.60		447.77		385.45
C	Pengelolaan Pengembangan Teknologi Informasi, UPP dan PPID BSPJI Padang			86.08		63.50		75.36		27.65
D	Layanan pengelolaan majalah/jurnal ilmiah dan publikasi KTI dan penerapan akreditasi jurnal			54.56		47.30		20.44		9.00
E	Renovasi Gedung Laboratorium			596.57		72.37		117.00		
F	Langganan Daya dan Jasa			616.92		488.08		428.34		452.28
G	Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh			52.07		35.75		38.61		27.46
H	Pengadaan pakaian kerja satpam/Sopir/Pramu bakti			17.79		9.71				
I	Perbaikan Peralatan kantor			440.11		454.93		378.83		476.87
J	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor			110.23		126.93		46.08		64.52

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
K	Pengelolaan Kearsipan			21.26		28.39		11.19		
L	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokum entasi					1.17		3.20		
M	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2			7.50		7.50		7.00		15.00
N	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4			116.00		120.00		144.14		150.00
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.10		80.10		74.00		75.00	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			91.85		48.47		64.95		107.63
B	Pelaksanaan dan pemantauan sistem mutu ISO 9001 : 2015			27.680		44.93		39.24		
C	Peningkatan Budaya Mutu melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi			5.50		6.54				
D	Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			18.08		12.83				
SK8.2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90		90		91		92	
A	Honorarium Pejabat Perbendaharaan			229.20		220.69		216.82		133.87
B	Akuntansi keuangan negara dan inventarisasi kekayaan negara			21.17		9.04		27.71		54.32
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru				7,532.23		6,763.35		7,592.22		8,462.98

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		10		12	
A	Pendampingan Penyusunan RBPI bagi industri							20.30		
B	- Analisis Kebutuhan Teknologi dan Studi Kelayakan IKM di Provinsi Riau; - Operasionalisasi Miniplant Hasil Litbangyasa			88.49						
C	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Industri dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu produk industri					67.62				
D	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri							33.82		29.56
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Penerapan dan pengawasan standardisasi industri							35.03		27.44
B	Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	Persen	5		10		12		15	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi									
A	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri (DAPATI)							35.85		
SK3.2	Meningkatnya PNBP layanan Jasa Industri	Persen	N/A		2		5		10	
A	Manajemen laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017			414.82		73.14		439.47		444.60
B	Manajemen laboratorium kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017			62.21		76.34		64.97		86.22
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi							67.56		177.21
D	Pembangunan lembaga inspeksi									
E	Manajemen lembaga inspeksi sesuai SNI ISO/IEC 17020 : 2012					71.91				
F	Manajemen Lembaga Pemeriksa Halal sesuai SNI ISO/IEC 17065 : 2012			26.69		36.51		88.06		64.60
G	Pemasaran kompetensi dan layanan jasa teknis BSPJI Pekanbaru					59.90		80.24		84.71
H	Temu pelanggan dan sosialisasi standardisasi dan pelayanan jasa industri							60.00		72.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		5		10	
A	Survailen laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025			58.60				55.98		
B	Perluasan ruang lingkup laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017					24.23				184.78
C	Perluasan ruang lingkup laboratorium kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017			77.46		82.51		64.25		89.22
D	Re-sertifikasi Sistem manajemen Mutu SNI ISO 9001/2015			40.10						
E	Surveilans Sistem Manajemen Mutu SNI					28.10		33.22		30.80
F	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK			12.38				7.76		
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		40		45		50	
A	Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi			183.22		120.74		30.00		20.00
B	Sarana Pelayanan Jasa Teknis			2,815.79		778.85		781.53		503.78
SK.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		93	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan									
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.40		3.45		3.50		3.52	
A	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan persepsi korupsi			11.50		7.00		12.00		3.00
B	Pemasaran kompetensi dan layanan jasa teknis BSPJI Pekanbaru			110.73						
C	Diseminasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan produk			16.34		47.55				
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		72		73		73	
A	Peningkatan kompetensi SDM			126.12		188.00		174.69		176.58
B	Gaji dan Tunjangan			1,686.59		2,617.59		3,206.64		3,964.79
SK7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.51		3.52		3.53		3.54	
A	Pengelolaan Unit Pelayanan Publik (UPP) dan Pengelolaan informasi dan Dokumentasi (PPID)			3.10		17.68		19.78		24.62
B	Operasional dan pemeliharaan kantor			1,717.58		2,389.70		2,128.88		2,370.69
SK8	Penguatan AKuntabilitas Organisasi									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Indeks	82		84		75		75	
A	Penyusunan Program dan Monev Kinerja BPPSI Pekanbaru			3.50		12.08		37.20		35.74
B	Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi							27.24		12.18
C	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			30.10		24.60		31.24		14.18
D	Pengembangan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi			43.40		30.30		35.47		20.68
SK.8.2	Nilai minimal laporan keuangan	Indeks	90		92		90		90	
A	Pelaporan Keuangan SAI dan Pengelolaan BMN			3.50		9.00		21.04		25.60
B	Inventarisasi Aset Rusak Balai									
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang				15,539.39		15,231.07		14,783.25		15,710.00
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		30		30	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi litbangyasa dan layanan teknis			117.95		116.73				
B	Kerjasama litbangyasa dan layanan teknis			30.63						
C	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis					25.00		365.95		65.35
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultansi yang dimanfaatkan oleh industri			N/A		N/A		100.00		100.00
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		2		2	
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	30		30		40		40	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri			26.08						
B	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultansi yang dimanfaatkan oleh industri					55.00		500.00		
C	Program DAPATI/PINOTI									
D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri									141.42
SK3.2	Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri	Persen	N/A		N/A		5		5	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi litbangyasa dan layanan teknis			77.48		122.92				
B	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis									167.50

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		5		5	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi Jasa							150.00		
B	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan							458.76		
C	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			158.82		1,364.24		792.73		778.10
D	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan Laboratorium Pengujian									289.45
E	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi							65.10		47.85
F	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan Laboratorium Kalibrasi									61.72
G	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi							310.53		313.78
H	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan Sertifikasi									330.79
I	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis							100.00		
J	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal									14.68

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
K	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan Lembaga Jaminan Produk Halal									15.58
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		40		45		50	
A	Layanan Perkantoran BPPI Baristand Industri			3,209.53						
B	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan							100.00		1,284.11
C	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran							30.00		30.00
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi									
SK.4	Tercapaiannya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92.0		92		93		95	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			35.05		71.68		27.21		13.98
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.6		3.6		3.6	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/ sosialisasi/ diseminasi									
B	Gaji dan Tunjangan*			10,129.33		8,996.32		7,631.56		8,616.90
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75		75		75		75	
A	Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan			195.56						
B	Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI*									
C	Pengelolaan/ Manajemen SDM					270.67				18.33
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM*									139.95
E	Layanan Manajemen SDM							45.40		
F	Layanan Pendidikan dan Pelatihan							150.00		
G	Penerbitan Buku dan Majalah							14.10		
H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor*					3,808.00		3,791.78		3,142.56
SK7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01		3.51		4.00		4.00	
A	Pengadaan Kendaraan motor operasional			1,486.79						
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					280.63				
C	Pengadaan Peralatan Perkantoran*									
D	Pengelolaan Data dan informasi							50.00		27.25
E	Gedung laboratorium/ workshop/ layanan yang dibangun/ direnovasi									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81		83		75		76	
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga			72.176						
B	Penyelenggaraan Kearsipan						21.57		21.57	
C	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas / SPIP					55.04		33.00		33.30
D	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi					34.30		10.40		10.40
SK.8.2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90		90		90		91	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					30.55		35.18		45.44
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung				16,283.97		16,270.55		17,328.75		19,454.53
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	5.5		6.5		8		10	
A	Kegiatan In-House Riset Baristand Industri Lampung			50.00						
B	Focus Group Discussion dan temu pelanggan (business gathering)			0.00		73.40				
C	Kegiatan Riset : Pengembangan Pupuk Organik Cair Pada Industri Kopi			26.06						
D	Pendampingan penerapan sistem keamanan pangan bagi industri di provinsi Lampung							25.00		25.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Pendampingan Sertifikasi TKDN bagi industri							188.50		25.00
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dan standardisasi industri	Perusahaan	1		2		3		4	
A	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			236.17		177.20		150.00		100.00
B	Pendampingan Asesment INDI 4.0 Bagi industri di Prov. Lampung							25.00		25.00
C	Fasilitasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendampingan/ Pembinaan Industri							10.00		10.00
D	Penerapan Teknologi Di Industri Prov. Lampung							25.00		25.00
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	1		2		3		4	
A	Kegiatan Implementasi Hasil Litbang Baristand Industri			16.12						
B	Pendampingan penyusunan dokumen ISO untuk industri			21.58		17.18				
C	Pendampingan sertifikasi produk halal							295.75		50.00
D	Konsultansi penerapan ISO 9001			3.72						
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	5.5		6.5		8		10	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi									
A	Seleksi Litbangyasa Baristand Industri Riset TA.2022			13.70		0.00		0.00		
B	DAPATI					0		71		0.00
SK3.2	Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri	Persen	3		4		5		6	
A	Layanan Laboratorium Pengujian Lingkungan Dan Aneka Komoditi			2,081.63		1,670.39		1,569.07		2,473.82
B	Layanan Lembaga Inspeksi Teknis			289.47		38.70		295.79		462.70
C	Workshop Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015			9.95		220.62		0.00		
D	Workshop Kalibrasi Instrumen			11.70		11.70		0.00		
E	Pelatihan Pemantauan Kualitas Udara					47.59		0.00		
F	Pelatihan Teknis bagi Industri					8.12		70.00		50.00
G	Renovasi gedung dan bangunan laboratorium			398.90		269.20		200.00		100.00
H	Layanan Laboratorium Kalibrasi			120.04		150.00		372.36		643.25
I	Layanan Lembaga Sertifikasi Produk			100.00		120.93		250.00		279.13
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		3.5		4	
A	Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan Jasa Teknis			0.00		0.00		222.44		
B	Koordinasi Peningkatan Layanan Laboratorium Kalibrasi			0.00		0.00		10.75		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Koordinasi Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk			0.00		0.00		12.41		
D	Pengembangan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dan LSP			0.00		0.00		68.80		
E	Kegiatan Surveillance Lembaga Pengujian Dan Inspeksi Teknis			0.00		0.00		91.12		80.00
F	Kegiatan Surveillance Lembaga Kalibrasi			0.00		0.00		40.29		50.00
G	Kegiatan Surveillance LSPro			0.00		0.00		42.01		50.00
H	Komite Ketidakberpihakan			0.00		0.00		2.90		
I	Pemeliharaan Akreditasi SMM ISO 9001:2015 terintegrasi			0.00				6.31		
J	Pengembangan Lembaga Pemeriksaa dan Pengujian Halal							50.00		50.00
K	Audit Eksternal Layanan BLU			0.00				52.00		
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	35		50		60		65	
A	Pengadaan fasilitas perkantoran			1,321.11		948.88		1,494.00		199.00
B	Sarana Pelayanan Jasa Teknis			636.00		571.00		764.50		1,886.35
SK.4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		93	
A	Implementasi SPIP			9.09		9.09				
B	Implementasi ZI Menuju WBK			35.03		12.78		12.78		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pembinaan dan Pengamanan Aset					8.35				
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.5		3.5		3.5	
A	Focus Group Discussion (fgd) Dan Temu Pelanggan (bussines Gathering)			72.00		0.00		214.86		211.00
B	Promosi dan Pemasaran			100.62		86.25				39.00
C	Diseminasi Hasil Litbangyasa Baristand Industri			34.80		0.00				
D	Website Dan Sistem Informasi Balai			228.00		282.00				
E	Kegiatan Publikasi Ilmiah			46.55		40.27		80.54		
F	Penyusunan Dan Publikasi Hasil Litbangyasa			45.08		0.00				
G	Workshop penggunaan aplikasi LS Pro					34.55				
H	Survey Kepuasan Pelanggan			0.00		2.20				
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75		76		77		78	
A	Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Ppc Air			27.82		0.00		28.16		24.26
B	Sertifikasi Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Padatan Dan Udara			28.08		0.00				
C	In-house Training Sertifikasi Ppc Air, Udara, Padatan			21.23		0.00				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Inhouse Training Peningkatan Kompetensi			17.74		17.47				
E	Diklat Teknis Undangan Instansi Terkait			9.21		79.61		27.63		11.50
F	Inhouse Training Pengelolaan Arsip Dinamis			0.00		10.34		14.24		14.24
G	Keikutsertaan Pegawai Dalam Diklat/ Kursus/ Workshop			38.18		79.35		207.30		
H	Inhouse training Manajemen Laboratorium dan Lingkungan					43.12				
I	Inhouse training Pemahaman ISO 17065:2012					30.88				
J	Gaji dan Tunjangan			5,610.77		5,599.55		6,052.96		8,174.28
K	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,326.10		3,846.08		3,980.00		4,179.00
SK7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.5		3.5		3.5		3.6	
A	Promosi dan Pemasaran*							48.34		
B	Survey Kepuasan Pelanggan*							39.88		
C	Layanan Laboratorium Kalibrasi			287.98		214.09				
D	Layanan Lembaga Sertifikasi Produk			138.79		174.45				
E	Koordinasi Peningkatan Layanan Pengujian Dan Standardisasi			430.94		302.10				
F	Koordinasi Peningkatan Layanan Laboratorium Kalibrasi			43.55		43.25				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
G	Koordinasi Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk			58.45		38.02				
H	Koordinasi Peningkatan Pelatihan			22.42		0.00				
I	Kegiatan Surveillance Lembaga Pengujian Dan Inspeksi Teknis			41.50		76.00				
J	Kegiatan Surveillance Lembaga Kalibrasi			29.00		54.36				
K	Kegiatan Surveillance LSPro			18.50		66.42				
L	Komite Ketidakberpihakan			35.52		9.54				
M	Sertifikasi ISO 9001:2015 terintegrasi			21.40		38.25				
N	Renovasi gedung dan bangunan laboratorium					50.00		105.00		151.00
O	Pengadaan kendaraan bermotor operasional					480.00				
P	Pelaksanaan Dan Pemantauan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 Integrasi			6.31		0.00				
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.1		80.5		81.1		81.5	
A	Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan					30.06				
B	Penyusunan Dan Perencanaan Program			4.09		9.00		5.00		15.60
C	Monev Penilaian Sakip, Lakip, PP39, Renkin, Dan Lap. Kegiatan Terkait			9.37		22.74		5.00		22.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Pelantikan Dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Fungsional Dan Cpns			1.20		1.20		2.40		3.20
E	Pembinaan Dan Sosialisasi Peraturan Kementerian Perindustrian			6.35		0.00		6.35		
F	Pengelolaan Arsip Dinamis			29.45		21.96		21.41		
G	Peningkatan Team-work Layanan Jasa Industri Balai Capacity Building			65.95		79.56		54.80		
H	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*							9.09		3.20
SK.8.1	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80		82		84		86	
A	Pelaporan Keuangan SAI dan Pengelolaan BMN			9.21		15.21				22.00
B	Inventarisasi Aset Rusak Balai			37.54		37.54		8.24		
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta				14,017.31		14,510.06		14,814.10		17,825.18
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		5		8	
A	Bimbingan Teknis Perusahaan Industri					743.20				
B	Pendampingan Konsultasi dan Pelatihan Perusahaan Industri									
C	Kerja Sama Teknologi Jasa Layanan Teknis									166.45
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		1		2		3	
A	Pendampingan Teknis Perusahaan Industri									450.91
B	Bimtek dan Pendampingan Teknis Industri							420.64		
C	Monitoring dan Pemantauan Proses Sertifikasi*									
D	Pendampingan Rancang Bangun dan Perekayaan Industri (RBPI) pada IKM							175.00		
E	Pengawasan Sertifikasi BSPJI Jakarta							100.00		
F	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi publik					306.64				
G	Layanan pendampingan dan konsultasi penerapan standar							74.10		
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A		N/A		10		15	
A	Pelaksanaan Konsultasi Teknis Industri									65.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK3.2	Meningkatnya PNPB layanan Jasa Industri	Persen	0.5		5		8		10	
A	Operasional Sertifikasi Industri			2,567.38		1,670.56		1,548.40		3,251.30
B	Monitoring pemantauan proses sertifikasi			186.90		67.02		53.57		
C	Pengawasan Sertifikasi BSPJI Jakarta*									
D	Jasa Pelatihan Sistem Mutu									297.59
E	Pelaksanaan Sertifikasi Halal									10.32
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		3		5	
A	Operasional Sertifikasi Industri*									
B	Monitoring pemantauan proses sertifikasi*									127.07
C	Pengawasan Sertifikasi BSPJI Jakarta*									
D	Penyusunan dokumen dan review dokumen			76.06		58.44		23.25		83.99
E	Internal Audit dan Tinjauan Manajemen			50.00		69.25		6.35		43.13
F	Penyusunan Skema Sertifikasi			128.52		73.65		37.55		68.51
G	Komite Kelembagaan Organisasi			54.84		24.41		47.77		31.72
H	Perluasan Lingkup dan Akreditasi			232.38		247.45		31.78		412.78
I	Verifikasi dan Evaluasi Laboratorium Pengujian			185.89						
J	Kerjasama Laboratorium Penguji					200.81		152.48		129.21

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
K	Evaluasi pengembangan personil			15.00						
L	Kolaborasi dengan instansi teknis							100.00		
M	Supervisi kegiatan sertifikasi			17.58						
N	Peningkatan profesioalisme personel			271.24						
O	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal									2.20
P	Akreditasi Laboratorium Kalibrasi									185.65
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	55		57		60		62	
A	Pengolahan data dan image processing			40.00						
B	Sewa kendaraan operasional pejabat					143.00		330.00		
C	Peralatan perkantoran			252.40						
D	pengolahan data dan informasi					238.29				30.00
E	pengadaan fasilitas kantor							76.00		116.44
F	peralatan lainnya			62.00						
G	Fasilitas peralatan perkantoran					141.59				
H	Pengadaan kendaraan operasional									28.00
I	Pengadaan Peralatan Laboratorium									328.50
SK.4	Tercapaiannya pengawasan internal yang efektif dan efisien									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		100		100	
A	Monitoring Evaluasi Program Anggaran			27.12		19.02		141.02		
B	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah									46.80
C	Zona Integritas									48.90
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan									
SK5.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.50		3.75		3.65		3.68	
A	Pemantauan kepuasan pelanggan			903.18		37.54		48.29		83.51
B	Promosi layanan teknis					131.67		103.39		133.97
C	Peralatan laboratorium									
D	Bimbingan Teknis Perusahaan Industri			457.55		242.31				
E	Promosi			375.05						
F	Perlengkapan laboratorium					87.66				
G	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi publik							258.73		6.68
H	Temu Pelanggan									431.49
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		73		74		75	
A	Workshop Pemahaman Produk/Proses/Sistem Industri			364.73		643.68		238.79		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Awareness Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi			11.45						
C	Workshop Lead Auditor			115.05		291.22		265.06		
D	Pengembangan Kompetensi									141.88
E	Pelatihan Kompetensi Administrasi Perkantoran/Pegawai			10.78		21.28		14.00		291.55
F	Konsinyering Pembinaan Budaya Kerja Pegawai			0.08						263.08
G	Pembinaan Keamanan Ketertiban Lingkungan			24.18		9.13				
H	Pembinaan Hospitality terkait Pengembangan Pegawai							6.62		3.86
I	Evaluasi Pengembangan Personel							3.05		
J	Workshop Industri			0.08						
K	Pembinaan Manajemen Kepegawaian			170.22		1.04				
L	Pembinaan Kompetensi Layanan Publik			0.04		7.47		4.77		5.91
M	Supervisi Personil Sertifikasi							35.41		
N	Peningkatan Profesionalisme Auditor							180.00		
O	Gaji dan Tunjangan PPPK									
P	Penyusunan Program Anggaran					190.37				
Q	Evaluasi Pengembangan Personel					12.70				8.97
R	Supervisi Personil Sertifikasi					23.31				19.26

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
S	Peningkatan Profesionalisme Auditor					0.70				
T	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			2,767.91		3,854.58		4,629.04		5,184.70
SK7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.25		3.55		4		4.01	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,192.10		4,231.42		4,575.76		4,527.98
B	Pengadaan kendaraan motor operasional (Sewa Oeprasional Kendaraan Pejabat							195.00		80.28
C	Pembangunan/ renovasi Gedung dan Bangunan			70.00						
D	Renovasi tembok gedung					136.28				
E	Pembangunan/ renovasi laboratorium									
F	Renovasi ruang aula					242.68				
G	Pengelolaan data dan Informasi			177.15						
H	Pengadaan Peralatan Laboratorium*									
I	pengadaan fasilitas kantor									196.00
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82		81		76		78	
A	Penyusunan Program Anggaran			60.71		63.41		123.77		88.80
B	Monitoring Evaluasi Program Anggaran									92.58

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Monitoring Pemantauan Pelaksanaan Perjakin									147.56
D	Kearsipan					15.44		8.68		34.48
E	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			6.61		3.01		6.41		
F	Zona Integritas			25.63		14.61		26.60		
SK.8.2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90		80		81		88	
A	Perbendaharaan Keuangan dan BMN			117.49		98.09		186.72		158.21
B	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga					147.14		586.10		
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya				25,393.70		27,258.04		24,822.60		28,419.33
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		10		15	
A	Implementasi Hasil Riset Bagi IKM dan Industri Mikro			74.85						
B	Pembinaan dan Pendampingan Industri					59.01				
C	Pembinaan dan Pendampingan IKM (Keg Kolaborasi Industri)							21.08		49.20
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		1		1		1	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pembinaan dan Konsultasi IKM dalam Rangka Penerapan SMM/Teknologi Industri					98.58				
B	Pembinaan dan Pendampingan Industri (Peningkatan Teknologi 4.0)							24.39		48.13
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Pelatihan dan Konsultasi Industri							170.56		135.40
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5		7		9		11	
A	Pembinaan dan Konsultasi IKM dalam Rangka Penerapan SMM/Teknologi Industri			74.58						
B	Pemanfaatan Teknologi Industri (Anggaran DAPATI)					141.75		96.07		100.00
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2		2		3		3	
A	Penyelenggaraan Pengujian Selama 12 Bulan			2,295.52		2,295.52		2,019.02		2,742.08
B	Penerapan dan Pengendalian Sistem Laboratorium			104.70		104.71		164.51		33.21
C	Penerapan Maintenance IPAL			81.85		81.85		81.85		81.85

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Jasa pelayanan teknis sertifikasi produk dan Sistem Manajemen Mutu			1,876.84		1,810.61		2,291.25		2,208.30
E	Iuran Organisasi Lokal/Internasional			25.60						
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		2		2.5	
A	Penyelenggaraan Pengujian Selama 12 Bulan*									
B	Penerapan dan Pengendalian Sistem Laboratorium*									
C	Penerapan Maintenance IPAL*									
D	Pelatihan dan Konsultasi Industri*									
E	Jasa pelayanan teknis sertifikasi*									
F	Jasa pelayanan teknis sertifikasi*									
G	Sertifikasi Lembaga Sistem Mutu*									
H	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan			122.15						
I	Perluasan Lingkup Akreditasi/Surveilance Lab Pengujian dan Kalibrasi			997.41		1,546.02		736.08		826.99
J	Perluasan Lingkup Akreditasi LSPRO			201.18		202.38		71.75		176.83
K	Akreditasi ISO 9001:2015 BSPJI Surabaya			165.97		165.97		475.10		159.96

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
L	Perluasan Lingkup Akreditasi LSSM BSPJI Surabaya			82.00		82.00		31.34		157.44
M	Akreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan BSPJI Surabaya			61.16		61.16		23.89		32.39
N	Sertifikasi LPH							8.04		41.16
O	Penyusunan Road Map Rencana Pengembangan LPK									
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	55		57		60		62	
A	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan			2,406.54		2,973.56		1,457.78		3,312.00
B	Renov Gedung Laboratorium			1,079.04		410.75		495.80		198.50
C	Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan					1,003.00		717.90		197.00
D	Pengadaan Peralatan Lab Dalam rangka Dukungan Kesehatan			156.20						
E	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			50.00						
F	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			53.49						
G	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			155.00						
H	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					198.00		142.50		62.00
I	Inventaris Perkantoran					241.50		146.23		186.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92		92		92.5		93	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			40.38		40.38		23.75		4.22
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.70		3.70		3.72		3.75	
A	Diseminasi Hasil Litbang			50.04						
B	Mengikuti Pameran Teknologi Nasional Regional			50.72		76.75		25.70		46.05
C	Promosi Layanan dan Peningkatan Pelayanan Publik			107.50						
D	Temu Pelanggan			179.40		219.84		66.15		302.64
E	Road Show			16.70		73.37		72.87		72.24
F	Sosialisasi Kebijakan Layanan Jasa Teknis Balai					34.40				
G	Pembuatan Video Profil Balai					30.00				
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		73	
A	Diklat Pelatihan Analisis, Operator, Keahlian, Pengembangan Kompetensi SDM			170.53		411.97		464.33		289.20
B	Workshop Audit dan PPC BI Surabaya			106.00		95.82		93.04		122.95

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Assesment dan Pembinaan Kompetensi Pegawai					43.74				
D	Pengembangan Kompetensi GPR			190.20						
E	Gaji dan Tunjangan			8,849.17		9,056.34		8,590.89		10,923.21
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.51		3.51		3.60		3.70	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			74.84		74.84		150.63		0.00
B	Peningkatan Layanan Informasi Digital Pelanggan					111.72				
C	Peningkatan Layanan Teknis Pelanggan			81.72						
D	Majalah/E Journal			74.79						
E	Pembuatan Prosiding			19.07						
F	Penyusunan KTI pada Jurnal Nasional/Internasional			1.00						
G	Rapat Koordinasi/Seminar KTI Nasional dan Internasional			60.16						
H	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI					79.71				
I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,956.66		5,024.24		5,802.33		5,701.44
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.1		80.1		78.0		79.0	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			63.87		63.87		155.71		27.85

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP					44.65		12.82		43.17
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90.00		90.00		90.25		90.25	
A	Penerapan dan Monitoring PIPK			17.75		63.87		4.22		23.75
B	Belanja Keperluan Kantor (Pengelolaan Keuangan)			219.12		236.16		185.04		114.17
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak				12,585.38		12,602.97		13,419.99		14,007.24
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		25		30	
A	Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang Pangan dalam Rangka Penerapan SNI			50.70		48.35		46.18		
B	Kegiatan Pengenalan Sistem Mutu dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar			49.30						
C	Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar					33.23		32.08		
D	Bimbingan Teknis dan fasilitasi persiapan industri halal pada industri pangan					57.78		67.05		
E	Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/ Instansi terkait			25.58						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
F	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi (DAPATI)							355.40		
G	Penerapan Industri Hijau pada IKM							12.02		
H	Pembinaan Penerapan Teknologi Cloud Computing pada Industri Kecil dan Menengah							24.90		
I	Efisiensi Proses Produksi pada IKM Pangan									52.39
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		1		1		1	
A	Kegiatan Kerjasama Konsultasi Teknologi Industri					22.11		20.66		23.52
B	Fasilitasi Self Assessment Industri 4.0 Pada Industri							39.50		
C	Pendampingan RBPI bagi industri							60.00		
D	Konsultansi di bidang Sistem Manajemen Mutu							50.00		
E	Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0									64.40
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		2	
A	Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah									145.62
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A		6		30		35	
A	Klinik Teknologi Berjalan Kalbar			39.21		42.13		21.69		
B	Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengelolaan Kualitas Produk									
C	Klinik Industri Terpadu									138.08
SK.3.2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	4		4		2		5	
A	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji			1,192.34		937.13		1,002.32		1,227.07
B	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi			71.28		106.43		120.04		157.90
C	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk			58.03		145.66		83.89		142.83
D	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kepada Pihak Industri			42.06						
E	Promosi BSPJI Pontianak			17.50		41.20		41.20		17.50
F	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri					42.06		42.07		105.33
G	Pengawasan standardisasi industri							44.65		51.60

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		2		4	
A	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji (Perusahaan menerapkan kebijakan standardisasi Industri)*									
B	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi*									
C	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk*									
D	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kepada Pihak Industri*									
E	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*									
F	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK							40.00		
G	Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu Baristand Industri/BSPJI Pontianak			79.08		63.78		63.78		
H	Pelaksanaan K3 dan Pengelolaan B3 di Laboratorium Lingkungan dalam rangka Persiapan Registrasi ke KLHK					31.28				45.30
I	Pelaksanaan dan Monitoring K3 di Lingkungan BSPJI Pontianak							18.52		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
J	Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak							64.02		
K	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk					114.43		182.31		
L	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji			102.05						
M	Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Bersih dan Air Baku secara Spektrofotometri			55.90						
N	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi			75.08						
O	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di Lembaga Sertifikat Produk			109.26						
P	Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi untuk Pembentukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau					24.53				
Q	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau							65.42		
R	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
S	Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak									195.47
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	45		47		70		71	
A	Pengadaan Peralatan Laboratorium Laboratorium			635.49		606.45		707.48		894.12
B	Pengadaan Perlengkapan Sampling			26.70						
C	Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi			81.92		48.75		42.48		117.31
D	Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya			105.43		38.40		55.81		57.53
E	Pengadaan Alat Pendingin			14.00		14.00				
F	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional Laboratorium					56.81				
G	Pengadaan Inventaris Lainnya							64.00		
H	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lainnya									
I	Penambahan Nilai Gedung Laboratorium									
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		91.5		100		100	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja			33.16		18.10		9.05		
B	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SPIP									21.40
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.50		3.50		3.60		3.65	
A	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik			41.44		48.99		48.99		60.84
B	Penerbitan Majalah Semipopular Industri			24.93		24.93		24.83		
C	Penerbitan E-jurnal Biopropal Industri			44.08						
D	Implementasi Hasil Riset			11.69						
E	Persiapan Penambahan Lingkup Minyak Goreng Sawit dan Paramater Lingkungan di Laboratorium Penguji BSPJI Pontianak					26.33				
F	Publikasi dan Sosialisasi Pemahaman Industri Hijau					41.98				
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		74	
A	In House Training Bagi SDM Balai			56.98				39.44		37.40
B	Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri			17.50		54.45		92.78		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Online Training Bagi SDM Jasa Teknis Industri			16.00						
D	Pelatihan Bagi SDM Balai Lainnya			41.53						
E	Peningkatan kompetensi SDM Balai					24.31		46.94		52.93
F	Peningkatan Berkelanjutan Kompetensi SDM Industri					105.87				
G	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan			6,267.16		6,342.62		6,145.75		6,484.21
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.5		3.8		4.1		4.2	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,853.36		3,200.00		3,360.00		3,460.80
B	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Baristand Industri Pontianak			88.34		46.26		104.05		
C	Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Baristand Industri Pontianak			8.10		42.26		20.44		
D	Business Gathering BSPJI Pontianak			50.37		40.12		40.12		
E	Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak									224.18
F	Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik BSPJI Pontianak									123.32
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	81		81		77		79	
A	Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja			88.79		58.01		72.52		
B	Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak Tahun 2020 – 2024			13.78		12.78		14.93		
C	Monitoring Triwulan Alki dan Tapkin Serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya			34.41		11.04		11.04		22.99
D	Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak			38.32		27.44		9.97		5.58
E	Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja*									
F	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Anggaran dan Penyusunan Renstra Balai									53.94
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	92		92		94		96	
A	Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			24.54		2.98		11.67		23.68
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru				14,742.33		13,889.93		15,807.49		17,078.91
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		35		40	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Penguatan Sentra HKI Baristand Industri Banjarbaru			20.55						
B	Kajian Lembaga Teknologi Industri			45.60						
C	Lembaga Teknologi Industri					163.80				
D	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri							125.11		125.00
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		N/A		1	
A	Kajian Teknologi Industri			10.92						
B	Optimalisasi Teknologi Proses Pengering Bahan			38.98						
C	Optimalisasi Teknologi Penepung Bahan Pangan			11.55						
D	Lembaga Teknologi Industri*									
E	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri*									
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	1		1		2		3	
A	Kajian Teknologi Industri									
B	Optimalisasi Teknologi Proses Pengering Bahan									
C	Optimalisasi Teknologi Penepung Bahan Pangan									
D	Lembaga Teknologi Industri*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri*									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	40		40		45		46	
A	DAPATI*									
B	Layanan Pendampingan, Konsultasi, dan RBPI									
C	Jasa Konsultasi Program DAPATI							79.05		
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1		1		7		7.5	
A	Layanan Pengujian			1,470.39		1,072.74		1,240.38		1,657.23
B	Pengelolaan Limbah			88.68		62.40		55.25		65.25
C	Layanan Sertifikasi			22.80		41.04		41.04		41.04
D	Layanan Pelatihan Teknis			10.88		43.07				
E	Layanan Pendampingan, Konsultasi, dan RBPI*									
F	Layanan Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri							39.59		39.59
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		0.1		0.5	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Layanan Pengujian*									
B	Pengelolaan Limbah*									
C	Layanan Sertifikasi*									
D	Layanan Pendampingan, Konsultasi, dan RBPI*									
E	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Pengujian			110.15		64.06		134.02		139.62
F	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17025 untuk Laboratorium Kalibrasi			23.74		57.15		15.35		43.63
G	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 17065			74.15						
H	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001			40.78		52.95				41.12
I	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 37001			40.70		40.34				39.81
J	Pemeliharaan dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi dan Halal					44.70		86.31		133.13
K	Pemeliharaan dan Pengembangan SMM ISO 9001 dan SMM ISO 37001							72.59		
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	44		45		55		60	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi			180.12						
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			186.09		199.50		136.88		78.36
C	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1,079.30						
D	Pembangunan Gedung Parkir Kendaraan Roda 2			99.00						
E	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat			194.00		125.00		190.16		
F	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium					268.00		258.12		200.00
G	Pengadaan Alat Perkantoran					139.00		134.00		151.78
H	Renovasi Gedung Laboratorium									200.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		95		100	
A	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			38.89						
B	Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja					29.36		79.40		66.90
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.50		3.50		3.60		3.62	
A	Diseminasi Layanan Jasa Industri			148.53						
B	Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri			149.90		125.59		151.18		179.52

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Pengembangan Sistem Informasi			70.00		70.20		47.31		61.31
D	Penerbitan Majalah/Jurnal			43.03		35.58		26.87		25.07
E	Renovasi Gedung Tidak Bertingkat*									
F	Renovasi Gedung Laboratorium*									
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		72		72		73	
A	Evaluasi Jabatan Fungsional			33.25						
B	Pendidikan/Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi SDM			88.63		84.38		183.18		433.39
C	Diklat Motivasi Pegawai			70.00		74.00				
D	Pengelolaan SDM					28.46		14.21		14.21
E	Gaji dan Tunjangan			7,236.04		7,840.30		9,332.13		9,792.91
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.60		3.65		3.70		4.01	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,071.07		3,140.70		3,297.74		3,462.62
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	81		81		78.5		80.5	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			8.75						
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Penyusunan Rencana Program BSPJI Banjarbaru					9.65		25.47		25.47
D	Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan					10.00		27.29		25.00
E	Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja*									
F	Pembangunan Zona Integritas dan SPIP			35.88		21.70		14.88		36.96
G	Pembangunan Zona Integritas					46.28				
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		90		91		91.5	
A	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi*									
B	Evaluasi Program/Kegiatan dan Pelaporan Kinerja*									
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda				14,168.36		14,752.62		14,698.50		18,633.15
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		20		25	
A	Kerjasama Litbangyasa dan Layanan Teknis Balai			86.78						
B	Penjajakan Kerjasama/ *Kerjasama dan Kemitraan					82.73		41.53		151.56
C	Konsultasi Industri									
D	Pembinaan Teknologi Industri									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri									92.10
F	Optimalisasi proses produksi IKM melalui perbaikan desain alur proses produksi (RBPI)									
G	Evaluasi implementasi desain alur proses produksi (RBPI)									
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		N/A		N/A	
A	Konsultasi Industri			11.22		47.84				
B	Pengawasan produk SPPT SNI LSPro Samarinda Etam									
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		10		12	
A	Konsultasi Industri							161.39		209.75
B	Pengawasan produk SPPT SNI LSPro Samarinda Etam									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	25		30		50		55	
A	DAPATI					125.27		85.72		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2.50		2.75		3		3	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi			1,083.26		952.63		956.22		921.84
B	Sampling			305.10		287.10		370.28		425.25
C	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium					54.52		29.85		61.40
D	Sertifikasi Produk			85.76		64.06		67.93		91.10
E	Pelatihan SDM Industri/ *Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri			42.00		46.95		81.40		167.60
F	Penyusunan Modul Pelatihan			29.09		10.30				
G	Desiminasi Hasil Litbang dan HKI di Kota Bontang			36.63						
H	Bimtek Penerapan SNI dan CPPOB di Kota Tenggarong			33.64						
I	Bimtek Penerapan SMM dan Teknis Produksi Bagi IKM di Kota Balikpapan			56.73						
J	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri					48.88		28.55		68.69
K	Diklat Pembinaan Industri Dalam Rangka Penerapan SNI dan CPPOB					31.37				
L	Diklat Pembinaan Industri Perlindungan KI dan Sosialisasi Alih Teknologi					29.71				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
M	Diklat Pembinaan Industri Optimalisasi Teknologi Proses dan Mutu sentra HKI					35.32				
N	Uji Profisiensi dan Uji Banding Lab. Kalibrasi							35.40		55.96
O	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal							28.57		20.00
P	Pemeriksaan Produk Halal									
Q	Verifikasi TKDN (inisiatif baru)									
R	Verifikasi Alat (inisiatif baru)									
S	Laboratorium Pangan (inisiatif baru)									
T	Laboratorium Migas (inisiatif baru)									
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		0.5		1	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi*									
B	Sampling*									
C	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium*									
D	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri*									
E	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi*									
F	Sertifikasi Produk*									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
G	Pelatihan SDM Industri*									
H	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal*									
I	Pemeriksaan Produk Halal*									
J	Verifikasi TKDN (inisiatif baru)*									
K	Verifikasi Alat (inisiatif baru)*									
L	Laboratorium Pangan (inisiatif baru)*									
M	Laboratorium Migas (inisiatif baru)*									
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		43		65		69	
A	Integrated Management System			161.82		205.34		258.17		284.89
B	Pengelolaan Limbah							48.07		
C	Penyusunan Roadmap LPK : Pembentukan lembaga LPH, LSSM, LSIH, LSSML									
D	Penyusunan Roadmap LPK : Akreditasi LPH, LSSM, LSIH, LSSML									
E	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/l ayanan			30.10						
F	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/l ayanan			371.07						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
G	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional			65.62						
H	Pengadaan peralatan pendukung komunikasi			6.00						
I	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			128.74						
J	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan			917.90						
K	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian					376.00		865.64		2,533.68
L	Pengadaan Pengolah Data					65.22		54.89		73.00
M	Pengadaan Alat Perkantoran					27.96		73.18		109.60
N	Pengadaan Mebelair					18.40		78.06		154.20
O	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran									
P	Pembangunan Gedung (Sentra Konsultasi)									
Q	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Sentra konsultasi)									
R	Pengadaan Mebelair (Sentra Konsultasi)									
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		92.5	
A	Penatalaksanaan Arsip			12.96						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					30.20				
C	Penatalaksanaan Kearsipan					15.40		13.95		3.59
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.61		3.62		3.63		3.64	
A	Promosi hasil litbang dan jasa layanan/ *Pemasaran/ Promosi Layanan Teknis			75.09		77.84		33.40		103.38
B	Pameran			83.53		93.68		88.64		99.97
C	Temu Pelanggan			56.64		131.06		172.06		251.22
D	Penerbitan Jurnal Riset dan Teknologi Industri			62.14						
E	Publikasi Karya Ilmiah			22.92						
F	Majalah Populer (Promosi)									
G	Pengelolaan Majalah/ Artikel Layanan Jasa Balai					38.63				
H	Publikasi Karya Ilmiah					8.15				
I	Seminar Nasional					42.26				
J	*Unit Pelayanan Publik									179.70
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	78		76		78		80	
A	Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM Balai			101.51						
B	In House training			40.62		71.43		90.04		71.68

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)			82.96		234.01		462.33		131.25
D	Penilaian Jabatan Fungsional Tertentu			8.35						
E	Seleksi Kompetensi Dasar Rekrutmen CPNS 2021			53.30						
F	Peningkatan Kompetensi SDM Balai					87.00		89.68		96.89
G	Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Penguatan Sdm Layanan Pengujian					74.15				
H	Peningkatan Kompetensi SDM Balai (Verifikasi TKDN, dan Verifikasi Alat)									
I	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi			7,340.32		7,589.45		6,201.28		7,921.94
J	Peningkatan Kompetensi SDM Balai (Penguatan LPK)									
K	*Webinar							1.64		
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.55		3.60		4.01		4.02	
A	Pengelolaan Data dan Informasi			131.13		141.11		131.48		70.00
B	Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik			121.43		86.25		91.03		
C	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen			246.23		256.80		324.62		338.40
D	Operasional Perkantoran			932.70						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
E	Layanan Operasional Laboratorium					277.02		374.66		476.13
F	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran			120.21		171.55		141.01		250.72
G	Perawatan Gedung			67.07		619.36		631.06		474.59
H	Langganan Daya dan Jasa			430.64		427.80		584.10		597.56
I	Perbaikan Peralatan Perkantoran			304.31		303.94		258.92		402.87
J	Perawatan Kendaraan			110.50		121.05		110.58		125.00
K	Layanan Operasional Perkantoran					1,007.58		1,246.78		1,421.05
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.4		79.0		76.0		78.0	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			118.63						
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			110.37						
C	Konsinyering Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Sesuai Permenpan RB No. 8 Tahun 2021			5.45						
D	Koordinasi Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi			62.40		43.38		89.24		
E	Penyusunan Program/ Kegiatan					137.13		78.05		67.21
F	Rapat Kerja Balai					20.32				
G	Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Balai					0.00		20.42		
H	Kaji Ulang RENSTRA					23.67				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
I	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai					27.10		32.03		54.70
J	Rapat Evaluasi dan Kaji ulang Renstra									
K	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*							87.94		16.60
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90.1		90.2		90.5		91.0	
A	Pengelolaan dan Inventaris BMN			15.50						
B	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)					29.04		40.87		29.09
C	Penatausahaan BMN					29.27		18.05		28.99
D	Inventarisasi, Penghapusan dan Hibah BMN					27.42		19.77		
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado				11,953.93		10,699.84		12,100.19		13,021.27
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		6		7	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri/A. Teknologi Pengolahan Minyak Goreng Kelapa di Kabupaten Bolaang Mongondow			35.00						
B	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis/A. Pelaksanaan kegiatan kolaborasi pemanfaatan teknologi dan layanan teknis			35.00						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/C. Optimalisasi Penerapan Teknologi Industri ke IKM di Sulawesi Utara			105.00		47.05		25.05		
D	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi/ A. Optimalisasi Teknologi Industri dan RBPI*									
E	Jasa konsultasi program DAPATI/ A. Optimalisasi Teknologi Proses Pengasapan Ikan dan Pendampingan Penerapan GMP									
F	Jasa konsultasi program DAPATI/ B. Teknologi Pengolahan Arang Tempurung Kelapa									
G	Penerapan Pemanfaatan Teknologi Oleh BSPJI/B. Penerapan Pemanfaatan Teknologi ke IKM									
H	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis/A. Pelaksanaan kegiatan kolaborasi pemanfaatan teknologi dan layanan teknis									48.53
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		N/A		N/A		N/A	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis			161.91		41.59				
B	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri/A. Penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Teknis IKM							41.59		15.26
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/B. Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/Diseminasi dan Bimbingan Teknis Hasil Litbang			28.70						
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	1		2		1		1	
A	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit/A. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit									
B	Analisis, Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri/A. Penerapan, dan Pengawasan Standardisasi Industri									
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis /C. Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan teknis									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	5		5		6		7	
A	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/A. Teknologi Pengolahan Arang Tempurung Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan			35.00						
B	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/ A. Pelaksanaan Konsultasi Industri									
C	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/A. Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri									50.00
D	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/B. Penerapan Pemanfaatan Teknologi ke IKM									50.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	2		2		4		5	
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium			436.56		436.56				
B	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI			70.74		70.74				
C	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado									
D	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado							22.93		
E	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado							29.75		
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		5		6	
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium							436.56		502.40

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Jasa pelayanan teknis kalibrasi/ A. Kalibrasi peralatan uji/proses									50.00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI							70.74		74.64
D	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado			24.25						
E	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/B. Peningkatan Kemampuan Labratorium Baristand Industri Manado			164.19						
F	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/C. Peningkatan Kemampuan ISO 9001: 2015 Baristand Industri Manado			28.80						
G	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado			21.00						
H	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado					21.25				55.59
I	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan					180.26		180.26		164.26

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	Kelembagaan/B. Peningkatan Kemampuan Labratorium Baristand Industri Manado									
J	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado*									22.93
K	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado*									29.75
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		40		90		91	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan/ A. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi			178.00		7.00		18.00		
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/ A. Peralatan Penunjang Laboratorium			54.00						
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/			675.79		66.00		232.18		190.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	A. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Layanan									
D	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi/A. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi									144.00
E	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran/A. Pengadaan Peralatan Meubelair									100.00
F	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran/B. Pengadaan Alat Perkantoran									
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		91.5		97		98	
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/F. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado			25.80		25.01		25.01		
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.50		3.50		3.60		3.60	
A	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi//Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/A. Pameran Hasil Litbang Promosi dan Pemasaran			24.80		35.99		23.44		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
B	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis/ A. Promosi/Publikasi dan Pemasaran									
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis/B. Temu Pelanggan									
D	Layanan Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi/A. Penerbitan Jurnal Ilmiah dan Majalah Komunikasi KTI			37.57						
E	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis/A. Promosi dan Pemasaran									
F	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis/A. Temu Pelanggan									35.00
G	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis/B. Sosialisasi Standardisasi dan Layanan Teknis									25.00
H	Publikasi Layanan Jasa Teknis/A. Promosi									40.00
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		75		76	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			70.30		70.32				
B	Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			50.00						
C	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/A. In House Training 17025:2017							25.14		53.39
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/C. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado							70.32		80.32
E	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/B. Pelatihan Teknis Mengikuti Diklat							55.02		65.02
F	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/D. Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado					50.00		50.00		65.00
G	Gaji dan Tunjangan/A. Pembayaran gaji dan tunjangan			6,549.44		6,434.50		7,572.92		7,706.95
H	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/E. Pengelolaan Kepegawaian			30.05		14.94		12.94		

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
I	Pengelolaan Manajemen/SDM/ A. Pengelolaan Kepegawaian							21.24		21.38
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.53		3.02		3.56		3.58	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/A. POLIKLINIK / OBAT-BATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER)			38.00		38.00		30.00		30.00
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/B. PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA PEGAWAI/TENAGA LABORATORIUM DAN BENGKEL			16.80		35.96		37.63		37.63
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/C. PERAWATAN GEDUNG KANTOR			207.30		245.14		234.90		395.70
D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/D. PERAWATAN KENDARAAN DINAS			67.10		78.99		78.99		90.36
E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/E. PERAWATAN SARANA GEDUNG KANTOR			663.12		430.94		302.66		293.85
F	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/F. LANGGANAN DAYA DAN JASA			343.20		279.60		279.60		330.00
G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/G. JASA POS DAN GIRO			12.20		8.00		4.20		4.20

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/H. OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN			1,616.28		2,017.00		2,167.32		2,010.89
I	Pengelolaan data dan informasi /A. Layanan SIL dan Website BSPJI Manado			17.75		17.75		4.55		20.92
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.1		80		75		76	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran /A. Penyusunan Program dan Rencana Kerja			104.92		21.88		21.88		53.99
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi/A. Monitoring dan Evaluasi			25.37		25.37		25.37		36.25
C	Penyelenggaraan Kearsipan/A. Penyelenggaraan Kearsipan									56.70
D	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/F. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado*									27.59
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	80		80		90		92	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/A. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan									43.76
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon				14,072.45		11,175.49		11,239.64		10,444.094
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		40.0		45.0	
A	Pendirian Inkubator Bisnis			38.46		36.60				
B	Penjajakan Kerjasama			44.15		44.15		50.00		36.24
C	Pameran/visualisasi/ publikasi			105.06		139.14		83.58		69.69
D	Temu Pelanggan			32.89				28.88		30.36
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri							50.00		
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	25		30		40		45	
A	DAPATI			394.53		603.05		300.00		
B	Layanan Konsultasi			17.84						
SK.3.2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	1		1		5		5.5	
A	Pengujian Bahan dan Produk			298.32		165.50		234.57		154.93
B	Kalibrasi, Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri			139.85						
C	Layanan Perbengkelan (RBPI)			114.85		114.85		114.85		257.71

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Layanan Pemeriksaan Halal							34.59		96.31
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		4		5	
A	Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh			108.00		102.00		96.00		84.00
B	Poliklinik/ Obat-Obatan			25.20						
C	Perawatan Gedung Kantor			198.76		194.27		324.14		234.59
D	Perawatan Sarana Kantor					134.80		284.02		237.20
E	Kalibrasi Alat Laboratorium			20.00		10.00		30.08		29.94
F	Surveillance Akreditasi LSPro			33.36						
G	Surveillance Laboratorium Kalibrasi			33.36						
H	Akreditasi LS-Pro/Sertifikasi Produk					32.66				50.93
I	Akreditasi Laboratorium Kalibrasi					34.76				
J	Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan LS-Pro)/Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk							43.16		30.08
K	Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi/Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi							41.76		27.50
L	Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi dan Halal			48.90						

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
M	Lembaga Pemeriksa Halal					33.60				
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		45		50		55	
A	Perawatan Sarana Kantor			119.37						
B	Langganan Daya dan Jasa			307.20		314.40		348.00		348.00
C	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/2			135.20		134.38		119.12		135.80
D	Operasional Perkantoraan dan Pimpinan			2,226.27		2,205.83		1,923.72		2,183.92
E	Pengadaan Peralatan Pelayanan Publik			8.00		8.00		8.00		
F	Pengadaan Peralatan Laboratorium			169.92		169.92		169.92		
G	Pengadaan Peralatan Bengkel			3.00		3.00		3.00		
H	Pengadaan Perangkat Pengolahan Data									105.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		100		100	
A	Penerapan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM			17.64		14.46		15.10		20.63
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.60		3.61		3.62		3.63	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengembangan Sistem Informasi Publik			10.00				24.10		
B	Layanan Kearsipan									28.91
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	70		72		75		77	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			9,102.00		6,026.34		6,134.66		5,650.27
B	Diklat Teknis Petugas Penggambil Contoh (PPC)/PPC Udara Ambient									65.13
C	Diklat ISO 17065			2.40				37.60		
D	Pelatihan Manajemen dan Pembuatan Bussiness Plan					22.58				
E	Pelatihan Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015					48.16				
F	Pelatihan Kesehatan dan keselamatan Kerja							37.60		
G	Peningkatan Kompetensi SDM									
H	Peningkatan Disiplin Pegawai									
I	Diklat Halal Assurance System					30.58				
J	In House Training Kalibrasi							40.93		
K	PELATIHAN Pemahaman ISO 37001; 2018 Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP)									28.73
L	Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO/IEC 9001:2015									18.41

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
M	Pelatihan Pemahaman Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal									52.81
N	Pelatihan Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3)									65.13
O	Pelatihan Kepemimpinan Administrator									36.59
P	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas									34.00
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.5		3.5		3.5		3.6	
A	Pelaksanaan Pameran/ Visualisasi / Publikasi dan Promosi */Promosi/Publikasi Pelayanan Teknis									36.50
B	Konsultansi pengembangan dan pemanfaatan teknologi					250.00		355.40		
C	Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium			106.42		108.94		114.04		102.43
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78		80		80		81	
A	Evaluasi Pelaksanaan Program 2021 dan persiapan Pelaksanaan Program 2022			74.00						
B	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran					79.24		80.00		74.38

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
C	Penyusunan dan Review Renstra 2020-2024					5.32		5.32		5.63
D	Monitoring Triwulan, ALKI dan TAPKIN serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerja					31.46		30.00		30.00
E	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern			24.30		24.30		24.30		29.33
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90		91		92		93	
A	Pelayanan Pelaporan Keuangan BMN			113.21						
B	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Barang Milik Negara					53.19		53.19		53.07

*Anggaran kegiatan/aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain

Lampiran III Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastruktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T1}}{\text{Jumlah SP pada T1}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T2}}{\text{Jumlah SP pada T2}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T3}}{\text{Jumlah SP pada T3}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>	57	62	68	76
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis. $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T4}}{\text{Jumlah SP pada T4}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Pedoman Kinerja pada P4SI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	5,5	5,6	6	6,5 (Akumulasi)
Definisi:	Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri dalam negeri, penerapan dan pemberlakuan SNI diharapkan dapat menurunkan jumlah impor, khususnya produk dengan kualitas di bawah standar. Indikator ini mengukur peningkatan jumlah SNI pada bidang industri yang sudah diterapkan dan diberlakukan.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, Total Jumlah SNI Bidang Industri Aktif pada tahun berjalan.				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kumulatif SNI yang diterapkan dan diberlakukan, dengan total SNI bidang Industri yang aktif dan tersedia pada tahun berjalan. Baseline total SNI bidang Industri aktif tahun 2021 adalah 5106 SNI, sehingga baseline (tahun 2021) SNI yang diterapkan adalah 364 SNI. Jumlah SNI sektor industri yang aktif dapat berubah-ubah setiap tahunnya. $= \frac{\text{Peningkatan Jumlah SNI}}{\text{Jumlah kumulatif SNI yang diterapkan dan diberlakukan}} \times \text{Total SNI bidang Industri yang aktif}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P4SI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P4SI	40	42	44	45
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew/Siswas BPKP/aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan				
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P4SI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/g	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di DN (hanya meliputi SNI wajib)	20	25	30	35 (akumulasi)
Definisi:	Dalam rangka mendukung penerapan dan pemberlakuan produk SNI wajib, perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi laboratorium uji sehingga ketersediaan laboratorium yang kompeten akan semakin meningkatkan proses layanan sertifikasi produk. Peningkatan kemampuan laboratorium dalam negeri disesuaikan berdasarkan parameter terkait pengujian SNI wajib.				
Sumber Data:	Daftar akreditasi Laboratorium uji di BSKJI yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional.				
Cara Menghitung:	Indikator ini diukur dengan jumlah kumulatif akreditasi ruang lingkup SNI Metode Uji yang dimiliki oleh Laboratorium di bawah BSKJI. Jumlah kumulatif ini berdasarkan SNI Wajib yang diberlakukan dengan asumsi minimum mendapatkan akreditasi dalam waktu 2 tahun.				
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P4SI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP4/a	Efektivitas regulasi standardisasi industri	74	76	78	80
Definisi:	Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi khususnya terkait standardisasi industri yang disusun oleh Kementerian Perindustrian diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, Sampling Data adalah hasil dari persentase standar yang dievaluasi.				
Cara Menghitung:	$Er = \frac{SRe}{Ts}$ Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi Teknis secara wajib yang tercapai tujuannya (berdasarkan <i>Regulation Impact Assessment</i>) Ts = Jumlah Total Sampel yang diambil (minimal 5) dengan rentang waktu 5 tahun pemberlakuan Regulasi Teknis secara wajib.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P4SI			

Pedoman Kinerja pada P2SI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	85	87	90	95
Definisi:	Indikator ini adalah indikator yang merepresentasi peningkatan tingkat kepatuhan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPRO, Lab uji, Lembaga Inspeksi). Kegiatan pengawasan dilaksanakan terbatas hanya pada LPK yang ditunjuk oleh Menteri (berdasarkan PP 28 Pasal 38 dan 39).				
Sumber Data:	Laporan pengawasan LPK berkala dan khusus (berasal dari pengaduan yang terverifikasi)				
Cara Menghitung:	Tingkat kepatuhan adalah rata-rata dari kepatuhan setiap LPK terhadap regulasi. Tingkat kepatuhan setiap LPK diketahui melalui pemeriksaan uji petik (pengambilan sampel) terhadap hasil penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK. Contoh: Terdapat beberapa sampel hasil penilaian kesesuaian yang diperiksa dari 5 (lima) LPK. Maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut: Tingkat kepatuhan LPK A = 8 sampel dari 10 sampel sesuai = 80% Tingkat kepatuhan LPK B = 7 sampel dari 10 sampel sesuai = 70% Tingkat kepatuhan LPK C = 9 sampel dari 10 sampel sesuai = 90% Tingkat kepatuhan LPK D = 9 sampel dari 10 sampel sesuai = 90% Tingkat kepatuhan LPK E = 10 sampel dari 10 sampel sesuai = 100% Rata-rata tingkat kepatuhan LPK = $(80\%+70\%+90\%+90\%+100\%)/5 = 86\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P2SI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di P2SI	72	75	78	80
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew/Siswas BPKP/aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan				
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P2SI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/h	Peningkatan cakupan jenis pengawasan SNI wajib.	5	20	30	50
Definisi:	Indikator ini adalah indikator yang merepresentasikan tingkat cakupan (jenis) dari jumlah SNI wajib yang mampu diawasi oleh P2SI.				
Sumber Data:	Laporan pengawasan standardisasi industri berkala dan khusus (berasal dari pengaduan yang terverifikasi).				
Cara Menghitung:	Indikator ini diperoleh dengan menghitung perbandingan jumlah SNI wajib yang diawasi dibagi dengan total SNI wajib. SNI Wajib dapat ditentukan dengan skala prioritas pengawasan. Tingkat cakupan (jenis) = $\frac{\text{Jumlah SNI Wajib yang diawasi}}{\text{Total SNI Wajib}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P2SI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/i	Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI Wajib.	30	50	75	95
Definisi:	Indikator ini merepresentasikan cakupan (wilayah) pengawasan terhadap SNI Wajib di Indonesia. Wilayah pengawasan dapat ditentukan per provinsi untuk memudahkan koordinasi dan merealisasikan pengawasan yang efektif.				
Sumber Data:	Pengawasan standardisasi industri berkala dan khusus (berasal dari pengaduan yang terverifikasi).				
Cara Menghitung:	Indikator ini diperoleh dengan menghitung rasio jumlah lokasi provinsi yang diawasi SNI wajibnya dibagi dengan total jumlah provinsi di Indonesia. Komoditas pengawasan SNI per provinsi bisa berbeda. Tingkat cakupan (Wilayah) = $\frac{\text{Jumlah Provinsi SNI Wajib yang diawasi}}{\text{Total Jumlah Propinsi}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: P2SI			

Pedoman Kinerja pada PIH

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2/SP1/a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	4	5	6	7
Definisi:	Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi. Peningkatan efisiensi energi ini dapat dilakukan dengan penerapan industri hijau seperti penggunaan bahan bakar alternatif, melakukan manajemen energi dan menerapkan standar berkelanjutan terkait energi seperti ISO 50001. Dalam peningkatan efisiensi energi ini, Pusat Industri Hijau (PIH) dan/atau Direktorat Jenderal (Ditjen) sektor pembina berperan memberikan fasilitas (fasilitas dapat diberikan oleh PIH/sektor pembina dalam bentuk pendampingan, pelatihan, restrukturisasi mesin, bantuan sertifikasi dan sebagainya).				
Sumber Data:	Hasil evaluasi PIH berdasarkan data SIINAS yang telah diverifikasi oleh PIH dan/atau Direktorat pembina				
Cara Menghitung:	Penggunaan energi (panas atau listrik) sebelum penerapan industri hijau (A); dan penggunaan energi setelah penerapan industri hijau (B). Persentase Efisiensi = $(A-B) / A \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: PIH			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/j	Persentase jumlah perusahaan yang mengelola limbah industri	N/A	N/A	0,8	1
Definisi:	Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses produksi industri manufaktur, berupa limbah padat dan/atau cair. Dalam mengelola limbah industri, PIH menyusun berbagai rekomendasi dan mendorong implementasi kebijakan pengelolaan limbah, sebagai upaya mengurangi, meningkatkan nilai tambah, dan memenuhi persyaratan kualitas limbah industri.				
Sumber Data:	Jumlah perusahaan menengah besar yang menerapkan industri hijau (Data T-1 dari penghargaan, sertifikasi, pendampingan industri hijau, dan laporan SIINas)				
Cara Menghitung:	Jumlah perusahaan menengah besar yang mengelola limbah industri (A); Total jumlah perusahaan menengah besar yang menghasilkan limbah industri paling sedikit meliputi sektor agro, kimia, tekstil dan logam (B) Persentase jumlah perusahaan = $A/B \times 100\%$ *Catatan: Data jumlah perusahaan (B) untuk dasar perhitungan tahun 2023 dan 2024 adalah 12.530 perusahaan.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: PIH			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP4/c	Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus	100	100	100	100
Definisi:	Standar Industri Hijau merupakan acuan perusahaan industri untuk mewujudkan industri hijau dengan mengatur penggunaan sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan industri agar lebih efisien dan efektif dan menjamin aspek manajemen yang lebih baik. SIH terdiri dari 2 persyaratan yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Persyaratan teknis mengatur batasan penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, pengelolaan limbah dan emisi GRK sedangkan persyaratan manajemen mengatur terkait aspek manajemen perusahaan. Dalam PP nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menyebutkan bahwa SIH disusun berdasarkan jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, asosiasi industri, Perusahaan Industri, dan/atau lembaga terkait.				
Sumber Data:	Daftar Rancangan Standar Industri Hijau (RSIH) yang disusun pada tahun berjalan dan daftar RSIH yang dikonsensuskan di tahun berjalan.				
Cara Menghitung:	Menghitung perbandingan jumlah rancangan SIH yang dikonsensuskan di tahun berjalan terhadap jumlah rancangan SIH yang disusun di tahun berjalan. Perbandingan tersebut dibuat dalam bentuk persentase. Pembuktian: Berita Acara Konsensus/bukti lain yang menyatakan konsensus telah selesai dilaksanakan				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: PIH			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2/SP5/a	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	43	72	95	125 (kumulatif)
Definisi:	Salah satu strategi pengembangan industri hijau dalam rangka mempercepat penerapan industri hijau oleh perusahaan industri adalah melalui proses Sertifikasi Industri Hijau dengan menerbitkan sertifikat industri hijau bagi perusahaan Industri yang memenuhi SIH oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. Bagi perusahaan industri yang telah mendapatkan Sertifikat Industri Hijau akan mendapatkan benefit berupa penggunaan Logo Industri Hijau yang dapat meningkatkan image dari produk tersebut. Pengembangan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Standar Industri Hijau merupakan acuan para pelaku industri dalam menyusun secara konsensus terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Indikator perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan adalah jumlah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SIH				
Sumber Data:	Data sertifikat yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang dikompilasi dan dilaporkan Pusat Industri Hijau				
Cara Menghitung:	Menghitung akumulasi jumlah perusahaan industri yang telah tersertifikasi SIH sampai dengan akhir tahun berjalan. Contoh: Pada akhir tahun berjalan 2022, akumulasi jumlah perusahaan yang memiliki sertifikasi SIH sebanyak 46 perusahaan.				
Satuan: Jumlah perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	PenanggungJawab: PIH			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3/SP5/c	Tingkat kepatuhan LSIH	N/A	N/A	N/A	100
Definisi:	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sertifikasi industri hijau. Dalam rangka menjamin proses sertifikasi industri hijau yang kredibel, maka diperlukan infrastruktur LSIH yang patuh terhadap peraturan yang berlaku. LSIH yang patuh adalah LSIH yang memenuhi kriteria dan prinsip LSIH sesuai Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau.				
Sumber Data:	Laporan Tim Penilai dan Pengawas (TPP) LSIH				
Cara Menghitung:	Indikator ini diperoleh dengan cara menghitung perbandingan LSIH yang patuh dibagi jumlah total LSIH yang diawasi. Tingkat kepatuhan = $\frac{\text{Jumlah LSIH yang patuh}}{\text{Total LSIH}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: PIH			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di PIH	68	70	80	85
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew/Siswas BPKP/aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan				
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: PIH			

Pedoman Kinerja pada POPTIKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2022)	2023	2024
T2/SP1/b	Persentase jumlah perusahaan peserta rintisan teknologi yang produktivitas/efisiensinya meningkat	65	95	95
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Kementerian Perindustrian merancang Rintisan teknologi industri (RINTEK) yang hadir sebagai motivasi bagi industri agar terus berupaya dalam menghasilkan perekayasaan, invensi, dan/atau inovasi teknologi dalam rangka mengembangkan proses bisnisnya. Peserta RINTEK adalah perusahaan industri yang mengikuti <i>workshop</i> RINTEK.			
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan RINTEK oleh POPTIKJI			
Cara Menghitung:	Data yang diperlukan untuk menghitung indikator ini adalah jumlah perusahaan yang nilai ukuran performanya meningkat setelah penerapan (B) dari sebelum penerapan (A). $\text{Nilai indikator} = \frac{\text{Jumlah perusahaan yang } B > A}{\text{Jumlah peserta RINTEK}} \times 100\%$			
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: POPTIKJI		

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP2/a	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	5	10	95	95
Definisi:	Perusahaan industri dapat menerapkan teknologi industri 4.0 sebagai alternatif cara untuk meningkatkan produktivitas dan/atau efisiensi perusahaan pada era modern ini. Pemanfaatan teknologi industri 4.0 yang dimaksud adalah yang menggunakan satu atau beberapa teknologi pilar industri 4.0, seperti artificial intelligence, big data, internet of things, cloud computing, 3D printing, augmented reality, advanced robotics, dan sebagainya. Keberhasilan pemanfaatan teknologi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah menerapkan teknologi 4.0 dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.				
Sumber Data:	Laporan penerapan teknologi 4.0 oleh perusahaan industri yang telah mendapatkan pendampingan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 4.0				
Cara Menghitung:	Data yang diperlukan untuk menghitung indikator ini adalah jumlah perusahaan yang nilai ukuran performanya meningkat setelah penerapan (B) dari sebelum penerapan (A). $\text{Nilai indikator} = \frac{\text{jumlah perusahaan yang } B > A}{\text{jumlah perusahaan peserta}} \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: POPTIKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/c	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	60	65	90	95
Definisi:	Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultansi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerjasama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Yang dimaksud dengan peningkatan produktivitas/efisiensi adalah Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi				
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh POPTIKJI termasuk yang diselenggarakan oleh Balai-Balai				
Cara Menghitung:	Data yang diperlukan untuk menghitung indikator ini adalah jumlah perusahaan yang nilai ukuran performanya meningkat setelah penerapan (B) dari sebelum penerapan (A). $\text{Nilai indikator} = \frac{\text{jumlah perusahaan yang } B > A}{\text{jumlah peserta DAPATI}} \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: POPTIKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di POPTIKJI	72	75	88	90
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranet/Siswas BPKP/aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan				
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: POPTIKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP4/b	Persentase rekomendasi di bidang jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	NA	70	75	80
Definisi:	Penyusunan rekomendasi di bidang jasa industri merupakan salah satu tugas yang diamanatkan kepada BSKJI. Rekomendasi di bidang jasa industri dilaksanakan secara kolaboratif untuk kemudian diterapkan oleh satuan-satuan kerja pembina atau stakeholder jasa industri terkait. Keberhasilan pemanfaatan rekomendasi di bidang jasa industri dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh satuan-satuan kerja pembina yang terkait dengan lingkup kebijakan.				
Sumber Data:	Laporan penyusunan rekomendasi jasa industri oleh POPTIKJI dan/atau hasil verifikasi jasa industri.				
Cara Menghitung:	Data yang diperlukan adalah akumulasi jumlah rekomendasi jasa industri yang dihasilkan oleh POPTIKJI (A) dan akumulasi jumlah rekomendasi jasa industri hasil POPTIKJI yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder (B). $\text{Nilai indikator} = \frac{B}{A} \times 100\%$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: POPTIKJI			

Pedoman Kinerja pada Sekretariat BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP6/a	Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI (Khusus di tingkat Eselon I)	N/A	N/A	2,89	3
Definisi:	Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan indeks untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.				
Sumber Data:	Laporan Level MRI BSKJI oleh Inspektorat Jenderal/ <i>self assessment</i> BSKJI (sesuai aturan yang berlaku pada saat tahun berjalan)				
Cara Menghitung:	Menghitung indeks MRI sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Umum Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	92	92	92,5
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal				
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI *Catatan: 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Keuangan Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	72	75	75	80
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew/Siswas BPKP/aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan				
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di seluruh Satker BSKJI RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN seluruh Satker berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN seluruh Satker berdasarkan akun terpilih.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Umum Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	70	70	71	71
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI				
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Organisasi dan SDM Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP8/b	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang Terpadu dan Terintegrasi	20	40	62	100
Definisi:	Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan <i>platform</i> yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker. Jumlah Satker yang memberikan pelayanan publik di lingkungan BSKJI adalah sebanyak 24 Satker.				
Sumber Data:	Laporan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu				
Cara Menghitung:	Menghitung persentase jumlah Satker yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu sampai dengan tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker yang memberikan pelayanan publik di lingkungan BSKJI (24 Satker)				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Hukum, Data dan Humas Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3/SP8/a	Indeks Manfaat Kerja Sama (Skala 1 - 5)	N/A	N/A	4	4
Definisi:	Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Kerja sama yang dimaksud adalah kegiatan kerja sama di lingkungan BSKJI yang menjadi kesepakatan dan telah tertuang dalam MoU/RoD/dokumen lain untuk dilaksanakan/diimplementasikan. Indeks Manfaat Kerja Sama adalah alat untuk mengukur manfaat hasil kerja sama dengan mempertimbangkan beberapa dimensi, termasuk dampak bagi organisasi dan efektivitas kegiatan kerja sama. Kerja sama yang dihitung indeksinya merupakan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri pada tahun T-1.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Manfaat Kerja Sama				
Cara Menghitung:	Indeks manfaat kerja sama dihitung dari: 1. Dimensi dampak bagi organisasi (bobot 0,6) 2. Dimensi efektivitas pelaksanaan kerja sama (bobot 0,4) Setiap pertanyaan dalam masing-masing dimensi dinilai dalam skala 1 sd. 5 oleh responden (Satker), kemudian hasilnya dihitung menggunakan rata-rata tertimbang sesuai pembobotan untuk mendapatkan hasil akhir Indeks Manfaat Kerja Sama.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Hukum, Data dan Humas Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP8/c	Satker yang memperoleh indeks layanan publik minimal B	25	35	45	60
Definisi:	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik				
Cara Menghitung:	Menghitung persentase jumlah Satker yang memperoleh indeks layanan publik minimal B dibandingkan dengan total seluruh Satker UPT (24 Satker). Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Hukum, Data dan Humas Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP9/a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI (Khusus di tingkat Eselon I)	N/A	N/A	73,8	74
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
Cara Menghitung:	Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Program dan Kerja Sama Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP9/a	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	N/A	N/A	89	93
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah Satker di lingkungan BSKJI yang telah mencapai minimal nilai BB pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah Satker di lingkungan BSKJI sebanyak 29 Satker				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Program dan Kerja Sama Sekretariat BSKJI			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4/SP9/b	Nilai minimal laporan keuangan BSKJI	N/A	N/A	90	90,5
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan.				
Sumber Data:	Hasil Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan				
Cara Menghitung:	Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas pengendalian intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Tim Keuangan Sekretariat BSKJI			

Pedoman Kinerja pada BBSPJI dan BSPJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T3/SP1/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
Definisi:	Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri. Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk <i>problem solving</i> industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur <i>outcome</i>-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. <i>Outcome</i> hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri. Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas. *Catatan: 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya.
Sumber Data:	1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa

Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B). $\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T1/SP2/b	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan Balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri. Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, <i>awareness</i> industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0. *Catatan: 1. BBSPJI wajib melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0. Kewajiban fasilitasi industri 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BSPJI dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selama disetujui oleh tim money BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain.
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industri 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/ atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industri 4.0.

Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai Besar

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/c	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	
Definisi:	Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang industri 4.0, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah: - Aspek materi (substansi/knowledge) - Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) - Aspek penyelenggaraan *Catatan: - Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0” wajib menyertai. - Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0 yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai Besar

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/d	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	
Definisi:	Dalam dokumen <i>Making Indonesia 4.0</i>, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan <i>Making Indonesia 4.0</i>. Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan). <i>*Catatan:</i> Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain	
Sumber Data:	Laporan hasil standardisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standardisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP2/e	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
Definisi:	Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang standardisasi industri, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah: d. Aspek materi (substansi/knowledge) e. Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli) f. Aspek penyelenggaraan *Catatan: 1. Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri” wajib menyertai. 2. Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi di bidang standardisasi industri yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	
Definisi:	Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultansi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultansi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultansi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi. <i>Outcome</i> kerja sama jasa konsultansi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati). *Catatan: 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultasi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan	
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultansi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultansi (B). $\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SP3/e	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.	
Sumber Data:	Data realisasi PNBP (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SP3/f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut: 1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 7. JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin) 8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) *Catatan: 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNPB (berbayar)	
Sumber Data:	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $Nilai\ Indikator = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI *Catatan: 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T2/SP5/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik	
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP8/c	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
Definisi:	Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1 -5)	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP9/a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP9/b	Nilai minimal laporan keuangan	
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung:	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Lampiran IV Matriks *Cascading*

TU JU AN	SP	K O D E	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					SET	P4SI	P2SI	POPT IKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE- 1	UKE -2/ UPT
Stakeholder Perspective													
T2	SP1	a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%					o			o	
T2	SP1	b	Persentase jumlah perusahaan peserta rintisan teknologi yang produktivitas/efisiensinya meningkat	%				o					o
T3	SP1	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	%						o	o		o
Customer Perspective													
T1	SP2	a	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	%				o				o	
T1	SP2	b	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan						o			o
T1	SP2	c	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0	Indeks						o			o
T1	SP2	d	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan						o	o		o

TU JU AN	SP	K O D E	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					SET	P4SI	P2SI	POPT IKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE- 1	UKE -2/ UPT
T1	SP2	e	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Indeks						o	o		o
T1	SP3	a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	%		o						o	
T1	SP3	b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%			o					o	
T1	SP3	c	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%				o		o	o	o	
T1	SP3	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	o	o	o	o	o	o	o	o	
T1	SP3	e	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	%						o	o		o
T1	SP3	f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	%						o	o		o
T1	SP3	g	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di DN (hanya meliputi SNI wajib)	Ruang Lingkup		o							o
T1	SP3	h	Peningkatan cakupan jenis pengawasan SNI wajib	%			o						o

TU JU AN	SP	K O D E	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT						KATEGORI	
					SET	P4SI	P2SI	POPT IKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE- 1
T1	SP3	i	Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI wajib.	%			o					o
T1	SP3	j	Persentase jumlah perusahaan yang memanfaatkan/ mengelola limbah industri	%					o			o
Internal Process Perspective												
T1	SP4	a	Efektivitas regulasi standarisasi industri	%		o					o	
T1	SP4	b	Persentase rekomendasi di bidang jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	%				o				o
T1	SP4	c	Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus	%					o			o
T2	SP5	a	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan					o		o	
T2	SP5	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks						o	o	o
T3	SP5	c	Tingkat kepatuhan LSIH	%					o			o
T4	SP6	a	Indeks penerapan Manajemen Risiko BSKJI (khusus Eselon 1)	Indeks							o	

TU JU AN	SP	K O D E	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					SET	P4SI	P2SI	POPT IKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE- 1	UKE -2/ UPT
T4	SP6	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	o					o	o	o	
Learning & Growth Perspective													
T4	SP7	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	o					o	o	o	
T3	SP8	a	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	o							o	
T4	SP8	b	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	%	o							o	
T4	SP8	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	o					o	o	o	
T4	SP9	a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	o					o	o	o	
T4	SP9	b	Nilai laporan keuangan BSKJI	Nilai	o					o	o	o	